

Rilis Survei Nasional

MEMBACA TREN KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

**5 Faktor Pemicu Penurunan Tren Kepuasan Publik dan
5 Formula Agenda Perbaikan Kinerja Pemerintah**

Periode Survei Tatap Muka 14 - 20 Agustus 2026

1220 Responden

PENDAHULUAN

- ❑ Mendekati dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan dan program yang sudah dijalankan perlu mendapatkan evaluasi publik. Efektivitas jalannya roda pemerintahan harus sejalan dengan ekspektasi penilaian publik agar Pemerintahan Prabowo – Gibran dapat berjalan dengan baik.
- ❑ Realisasi berbagai program prioritas terus berjalan di tengah tantangan ekonomi global serta dinamika sosial politik dalam negeri. Ketepatan eksekusi kebijakan dalam mengawal program-program strategis tersebut menjadi tolak ukur utama Pemerintahan Prabowo – Gibran.
- ❑ Selain sebagai sarana evaluasi, survei ini penting sebagai instrumen umpan balik yang valid untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Data empiris memegang peranan penting dalam mengidentifikasi sektor mana yang memperoleh kepuasan tinggi maupun yang masih membutuhkan perbaikan.

1. Mengukur Kondisi Ekonomi dan Persoalan Mendasar
2. Mengukur Pelaksanaan Program Prioritas Prabowo – Gibran
3. Mengukur Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih
4. Mengukur Evaluasi Penegakan Hukum dan Demokrasi
5. Mengukur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo – Gibran
6. Mengukur Peta Sebaran (*Crosstab*) Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo – Gibran
7. Kesimpulan
8. Faktor Pemicu Penurunan Tren Kepuasan Publik
9. Formula Agenda Perbaikan Kinerja Pemerintah



POPULASI SURVEI

Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (berusia ≥ 17 tahun/sudah menikah)



METODE SAMPEL

Menggunakan metode *multistage random sampling*



JUMLAH SAMPEL

Dari 1220 Responden,
(margin of error $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%)



METODE & WAKTU

Wawancara tatap muka
langsung dengan responden terpilih pada tanggal
14 – 20 Agustus 2026



SURVEYOR

Minimal mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan survei dari tim pusat.



VALIDASI DATA

Membandingkan data demografi hasil survei dengan data sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Stratifikasi: Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan provinsi. Selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing strata (provinsi).

1

Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan secara proporsional di seluruh provinsi yang dipilih secara acak. Jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden.

Dari masing-masing RT terpilih, dipilih secara random dua KK.

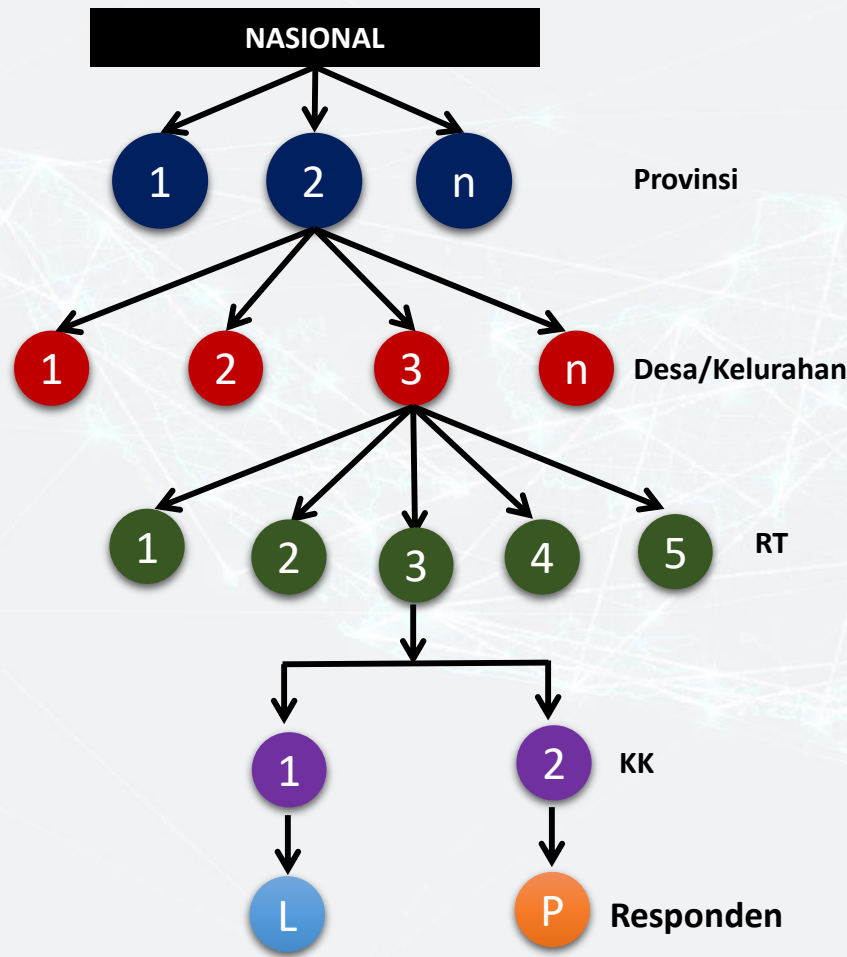
3

2

Dari masing-masing kelurahan/desa terpilih, didaftarkan populasi RT yang ada untuk dipilih lima RT secara acak (lima RT dari setiap kelurahan/desa terpilih).

Di setiap KK terpilih, didaftarkan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih. Kemudian dipilih secara random satu orang laki-laki/perempuan yang akan diwawancarai.

4



- ❑ Populasi pemilih nasional dikelompokkan menurut provinsi (stratifikasi).
- ❑ Desa/kelurahan di setiap provinsi dipilih secara acak dan proporsional.
- ❑ Di masing-masing desa/kelurahan terpilih, dipilih lima RT secara acak
- ❑ Di masing-masing RT terpilih, dipilih dua KK secara acak.
- ❑ Di KK terpilih, dipilih secara acak satu orang yang punya hak pilih laki-laki (kuesioner ganjil) / perempuan (kuesioner genap)

1 **Spotcheck Lapangan**

Sebanyak 20 persen dari total sampel didatangi dan diwawancarai kembali untuk memastikan kebenaran data.

Callback & Verifikasi Data 2

Seluruh data yang masuk (100%) dikontak kembali lewat telepon guna keperluan konfirmasi dan diverifikasi melalui kebenaran bukti wawancara (foto) dan *geolocation*.

4 **Proses Input Data**

4.a) Data collecting menggunakan kuesioner fisik dan kuesioner aplikasi sebagai kontrol real time. Aplikasi dapat dioperasikan di daerah yang tidak memiliki jaringan internet

4.b) Sebanyak 100 persen input data hasil wawancara ke data center diverifikasi. Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Quality control terhadap hasil survei dilakukan melalui cara-cara berikut :

Real-time Entry 3

3.a) *Input* data melalui teknologi aplikasi secara *real-time* oleh surveyor.

3.b) *Input* data hasil verifikasi telepon melalui desktop oleh tim verifikator yang sudah terlatih.

VALIDASI SAMPEL

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL	KATEGORI	POPULASI	SAMPEL
Gender			Wilayah		
Laki – laki	50.0%	50.0%	Kalimantan Selatan	1.5%	1.6%
Perempuan	50.0%	50.0%	DI Yogyakarta	1.4%	1.6%
Agama			Kalimantan Timur	1.4%	1.6%
Islam	86.8%	84.6%	Jambi	1.3%	1.6%
Protestan/Katolik	10.6%	12.5%	Sulawesi Tengah	1.1%	0.8%
Lainnya	2.6%	2.9%	Sulawesi Utara	1.0%	0.8%
Wilayah			Kalimantan Tengah	1.0%	0.8%
Jawa Barat	17.6%	16.7%	Sulawesi Tenggara	0.9%	0.8%
Jawa Timur	15.5%	15.0%	Kepulauan Riau	0.7%	0.8%
Jawa Tengah	13.9%	13.3%	Bengkulu	0.7%	0.8%
Sumatera Utara	5.3%	4.9%	Maluku	0.7%	0.8%
Banten	4.4%	4.1%	Papua Pegunungan	0.6%	0.8%
DKI Jakarta	4.1%	4.1%	Papua Tengah	0.6%	0.8%
Sulawesi Selatan	3.3%	3.3%	Kep. Bangka Belitung	0.5%	0.8%
Lampung	3.2%	3.3%	Sulawesi Barat	0.5%	0.8%
Sumatera Selatan	3.1%	3.3%	Maluku Utara	0.5%	0.8%
Riau	2.3%	1.6%	Gorontalo	0.4%	0.8%
Sumatera Barat	2.0%	1.6%	Papua	0.4%	0.8%
Nusa Tenggara Timur	2.0%	1.6%	Kalimantan Utara	0.2%	0.8%
Kalimantan Barat	2.0%	1.6%	Papua Barat Daya	0.2%	0.8%
Nusa Tenggara Barat	1.9%	1.6%	Papua Barat	0.2%	0.8%
Aceh	1.8%	1.6%	Papua Selatan	0.2%	0.8%
Bali	1.6%	1.6%			



KONDISI EKONOMI DAN PERSOALAN MENDASAR

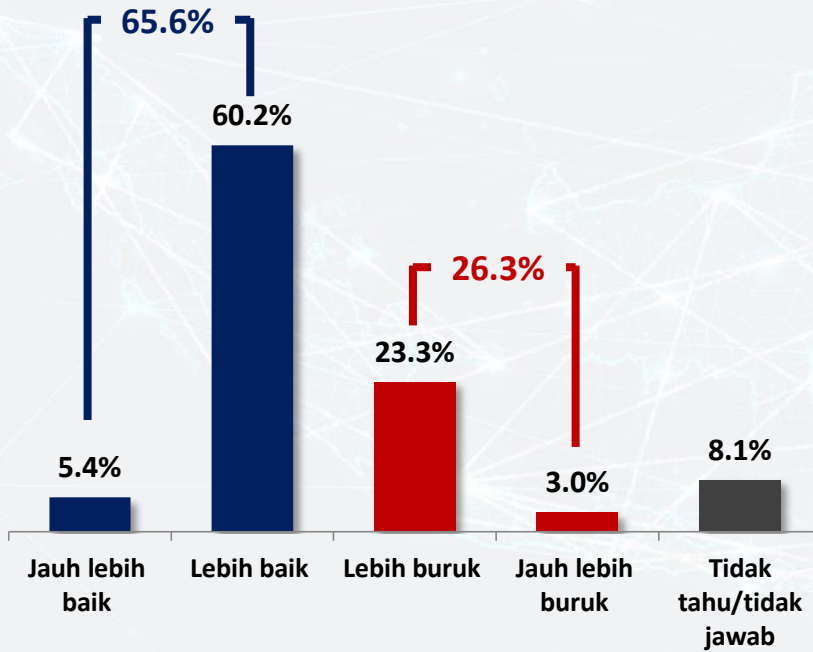
KONDISI EKONOMI DAN PERSOALAN MENDASAR

12

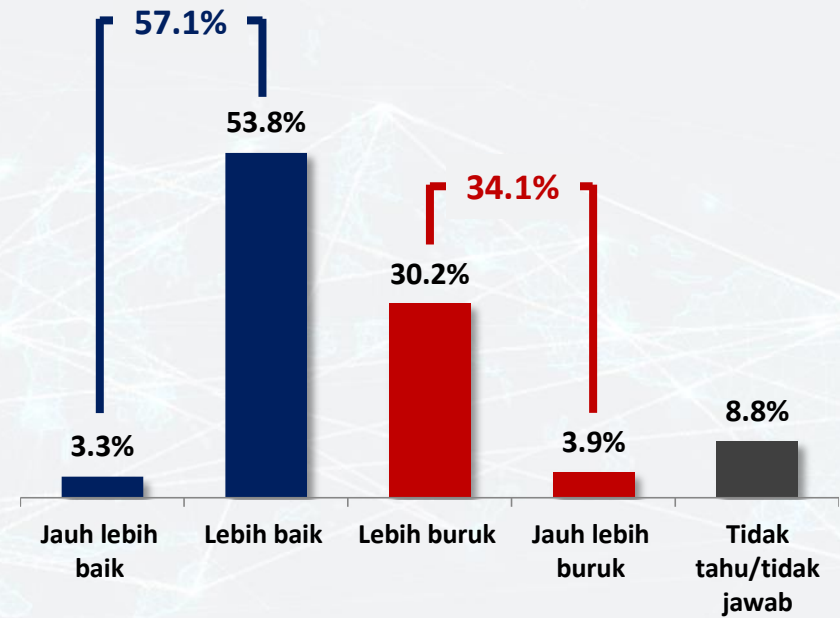
Kondisi Kehidupan Rumah Tangga dan Ekonomi Keluarga Setahun Terakhir



Bagaimana kondisi rumah tangga Bapak/Ibu/Saudara selama satu tahun terakhir?



Bagaimana kondisi ekonomi keuangan keluarga Bapak/Ibu/Saudara dalam rentang waktu setahun terakhir?



Sebanyak **(65.6%)** publik mengatakan baik (gabungan jauh lebih baik dan lebih baik) terhadap kondisi rumah tangga setahun terakhir, sedangkan **(26.3%)** publik mengatakan tidak baik (gabungan lebih buruk dan jauh lebih buruk). Sementara sebanyak **(57.1%)** publik mengatakan baik (gabungan jauh lebih baik dan lebih baik) terhadap kondisi ekonomi keuangan keluarga setahun terakhir, sedangkan **(34.1%)** publik mengatakan tidak baik (gabungan lebih buruk dan jauh lebih buruk).

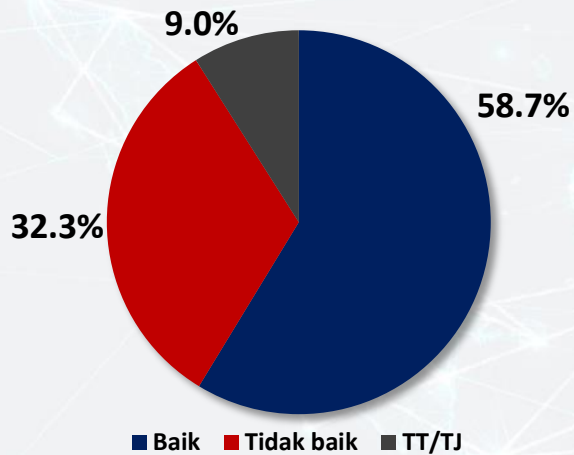
KONDISI EKONOMI DAN PERSOALAN MENDASAR

13

Penghasilan dan Pengeluaran Rumah Tangga Setahun Terakhir



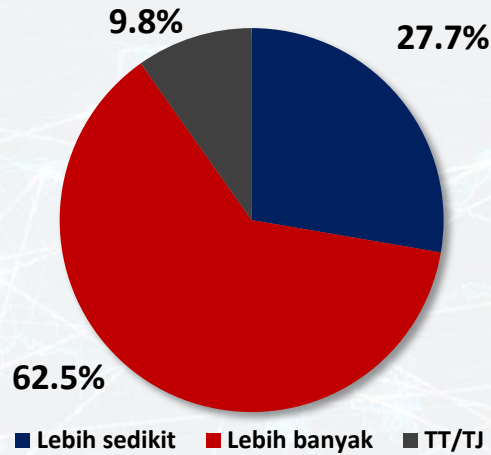
Bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/Ibu/Saudara selama satu tahun terakhir?



Penghasilan Setahun Terakhir



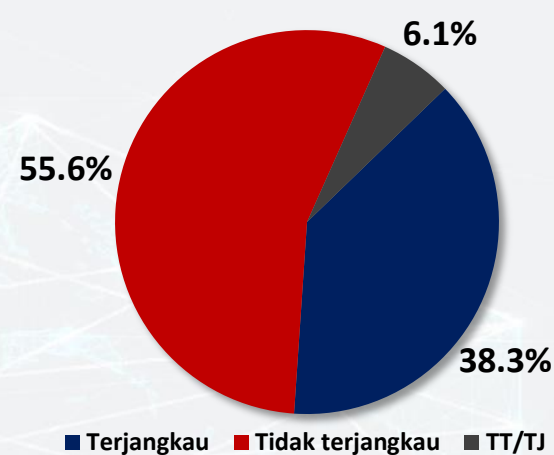
Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana pengeluaran rumah tangga saat ini dibanding tahun lalu?



Pengeluaran Setahun Terakhir



Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir?



Harga Kebutuhan Pokok Sebulan Terakhir

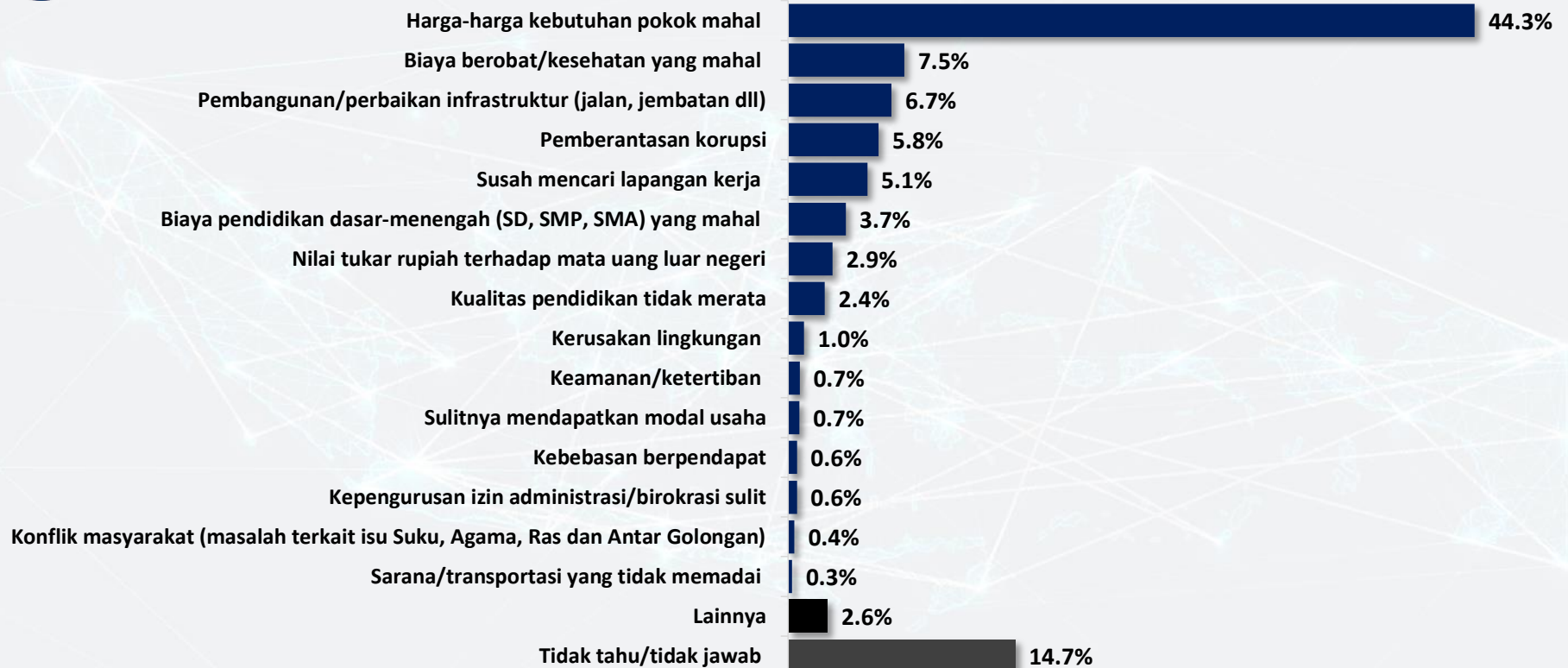
Sebanyak (58.7%) publik mengatakan baik terhadap kondisi penghasilan rumah tangga setahun terakhir, sedangkan (32.3%) publik mengatakan tidak baik. Sementara itu, sebanyak (62.5%) publik mengatakan lebih banyak terhadap kondisi pengeluaran rumah tangga saat ini dibanding tahun lalu, sedangkan (27.7%) publik mengatakan lebih sedikit. Lebih lanjut, (55.6%) publik mengatakan tidak terjangkau harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir, sedangkan (38.3%) publik mengatakan terjangkau.

KONDISI EKONOMI DAN PERSOALAN MENDASAR

14

Persoalan Paling Pokok yang Dialami Masyarakat

? Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah persoalan yang **PALING POKOK** yang tengah dihadapi masyarakat saat ini dan harus segera diselesaikan?



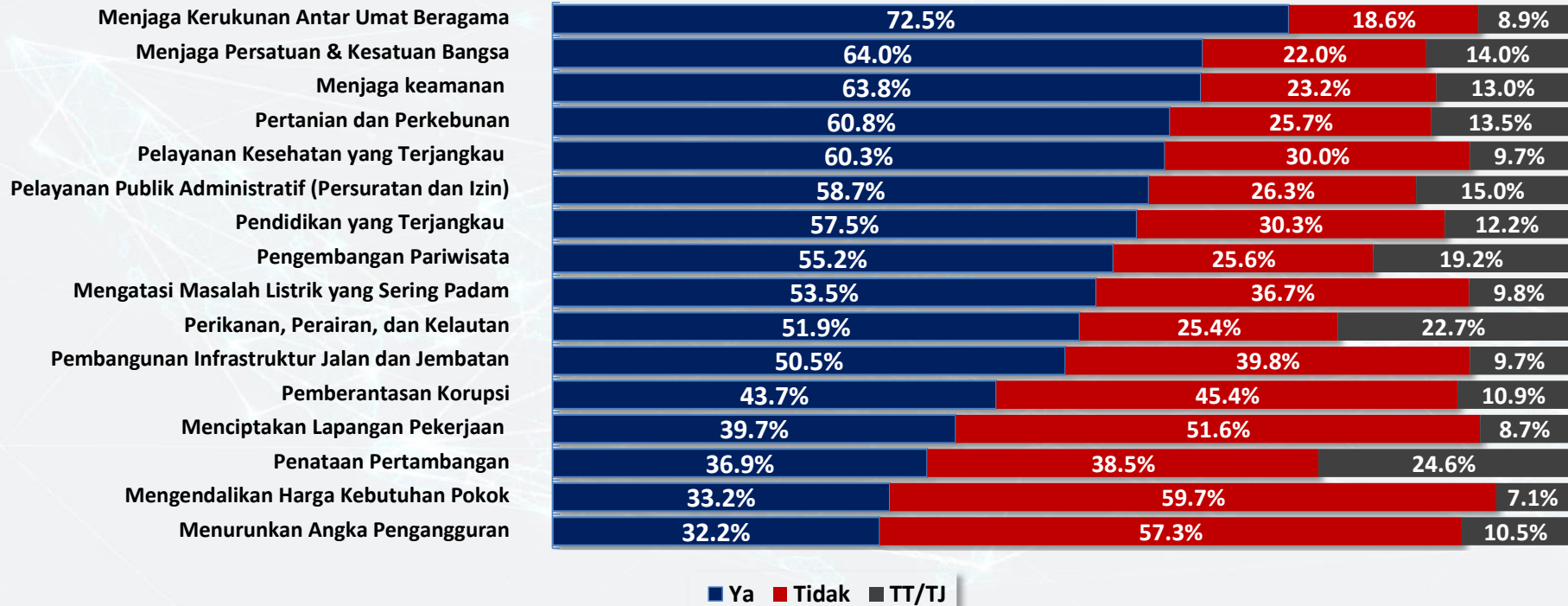
Harga-harga kebutuhan pokok mahal (**44.3%**) merupakan masalah paling pokok yang tengah dihadapi dan harus segera diselesaikan, diikuti biaya berobat/kesehatan yang mahal (**7.5%**), dan pembangunan/perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, dll) (**6.7%**).

KONDISI EKONOMI DAN PERSOALAN MENDASAR

15

Penanganan Masalah Pokok Bangsa

? Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini berhasil atau tidak berhasil dalam menangani masalah-masalah sebagai berikut?

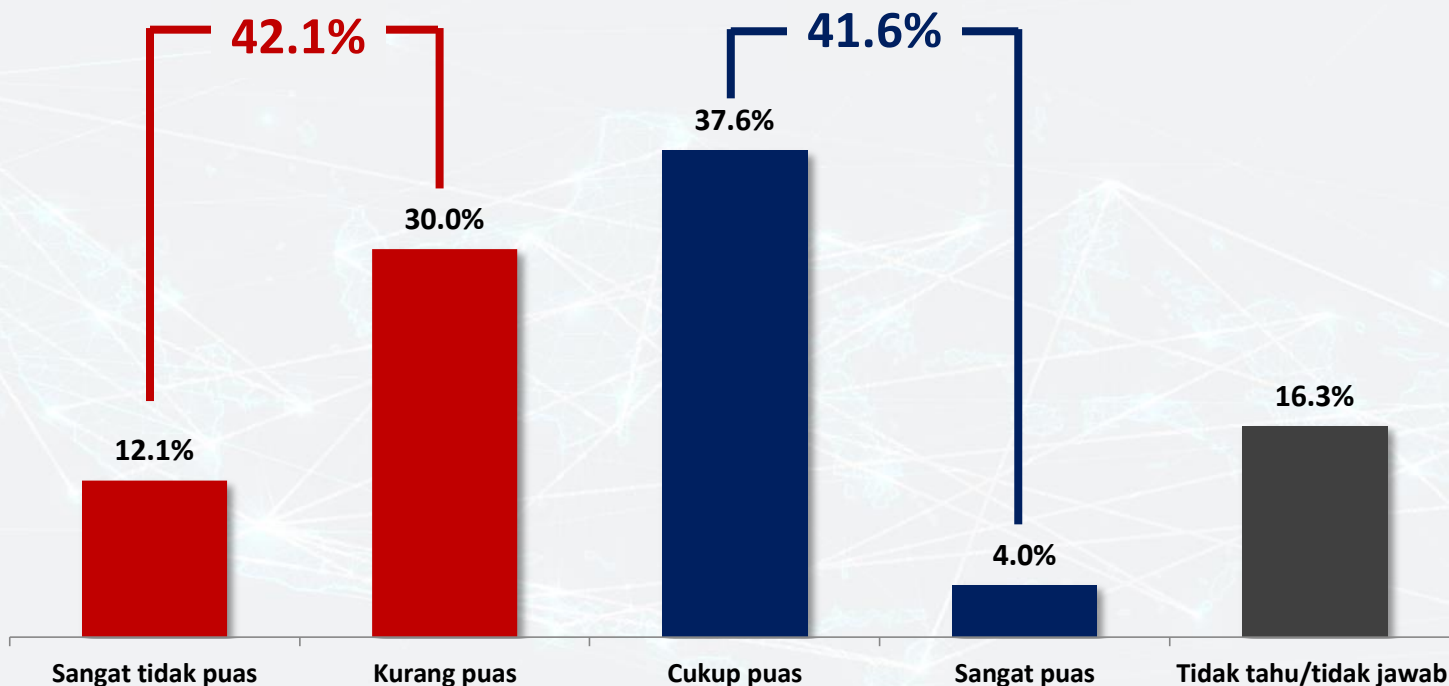


Menjaga kerukunan antar umat beragama (**72.5%**) merupakan masalah yang berhasil ditangani oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diikuti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (**64.0%**), serta menjaga keamanan (**63.8%**). Sedangkan, mengendalikan harga kebutuhan pokok (**33.2%**) dan menurunkan angka pengangguran (**32.2%**) merupakan dua masalah yang belum berhasil ditangani oleh pemerintah.

**PELAKSANAAN PROGRAM
PRIORITAS PRABOWO – GIBRAN**



Apakah Bapak/Ibu/Saudara **puas / tidak puas** terhadap Badan Gizi Nasional ?



sebanyak **(42.1%)** publik mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas) terhadap Badan Gizi Nasional, sedangkan **(41.6%)** publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas),

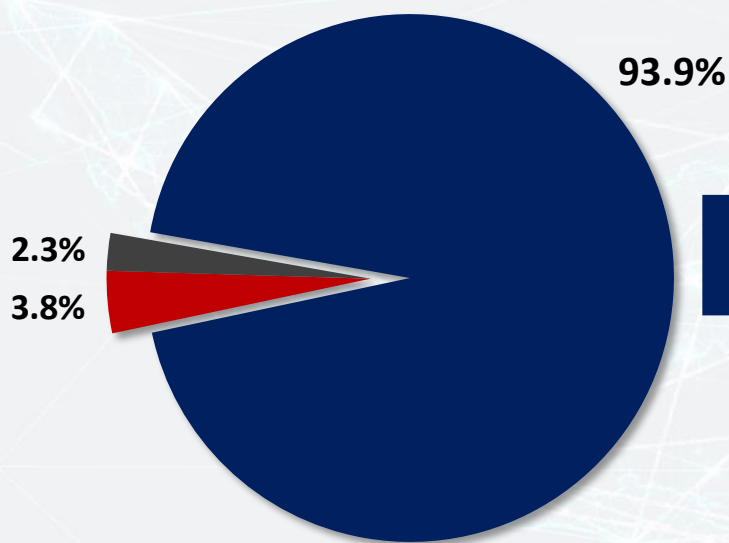
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PRABOWO - GIBRAN

Makan Bergizi Gratis [MBG] sebagai Program Prioritas

18



Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui program Makan Bergizi Gratis [MBG] yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo - Gibran?

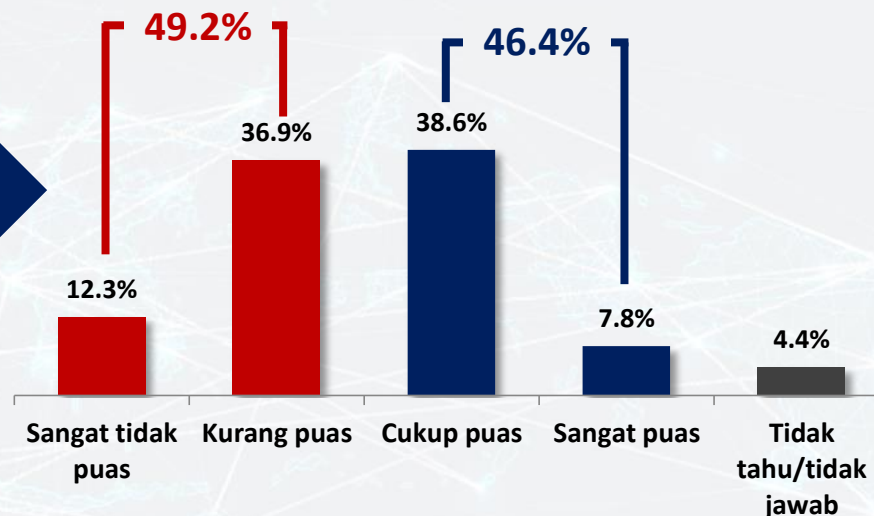


■ Tahu ■ Tidak tahu ■ Tidak jawab



Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas/tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis [MBG] yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo - Gibran?

Hanya yang menjawab tahu (93.9%)



Sebanyak **(93.9%)** publik mengetahui program Makan Bergizi Gratis [MBG] merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo - Gibran, sedangkan **(3.8%)** mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengetahui program Makan Bergizi Gratis [MBG] yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo - Gibran, sebanyak **(49.2%)** publik mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas) terhadap program Makan Bergizi Gratis [MBG], sedangkan **(46.4%)** publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas).

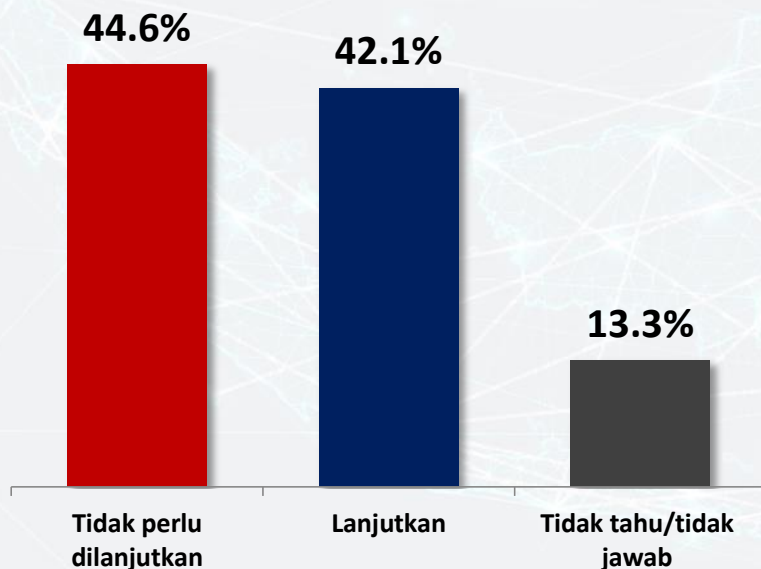
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PRABOWO - GIBRAN

Keberlanjutan & Permasalahan Program Makan Bergizi Gratis [MBG]

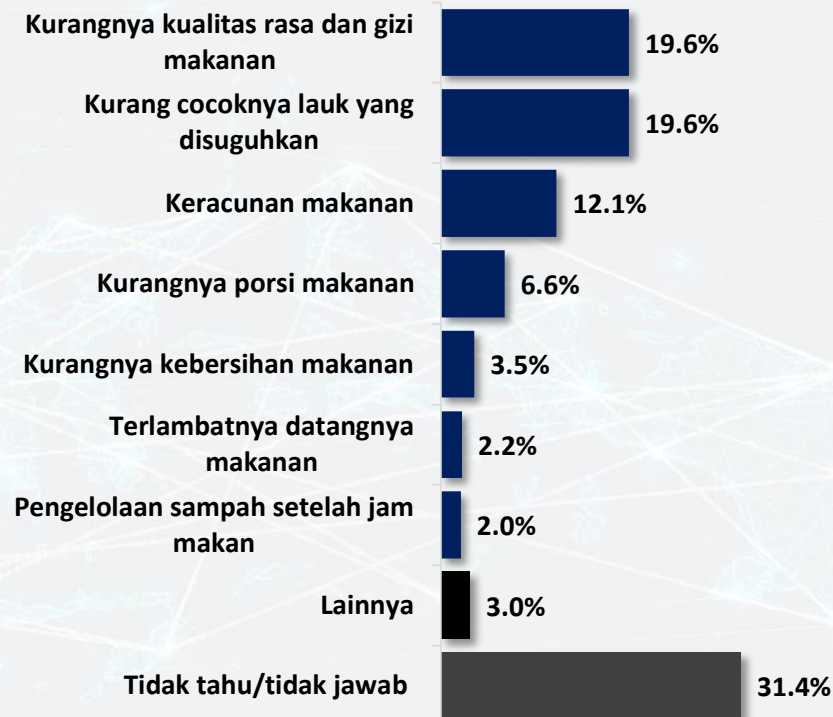
19



Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah program MBG harus tetap dilanjutkan?



Apa permasalahan utama dari pelaksanaan program MBG di lingkungan yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui?

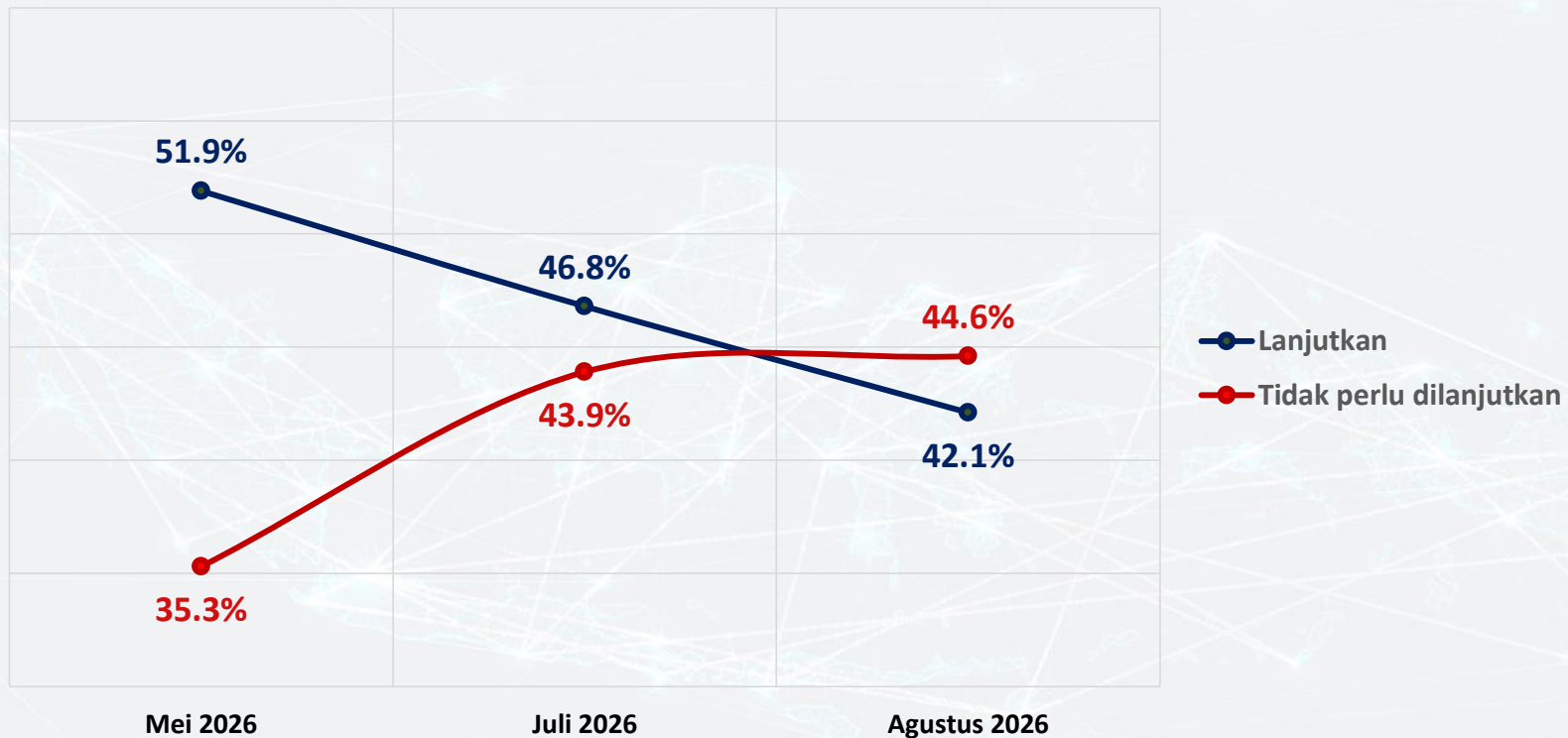


Sebanyak **(44.6%)** publik mengatakan program MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan **(42.1%)** mengatakan harus tetap dilanjutkan. Sementara menurut publik, permasalahan utama dari pelaksanaan program MBG di lingkungan sekitar adalah kurangnya kualitas rasa dan gizi makanan serta kurang cocoknya lauk yang disuguhkan **(19.6%)**, diikuti keracunan makanan **(12.1%)**, dan kurangnya porsi makanan **(6.6%)**.

TREN KEBERLANJUTAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Periode Survei Mei, Juli dan Agustus 2026

20



Tren keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Agustus 2026 cenderung menurun dibanding bulan Mei dan Juli 2026.

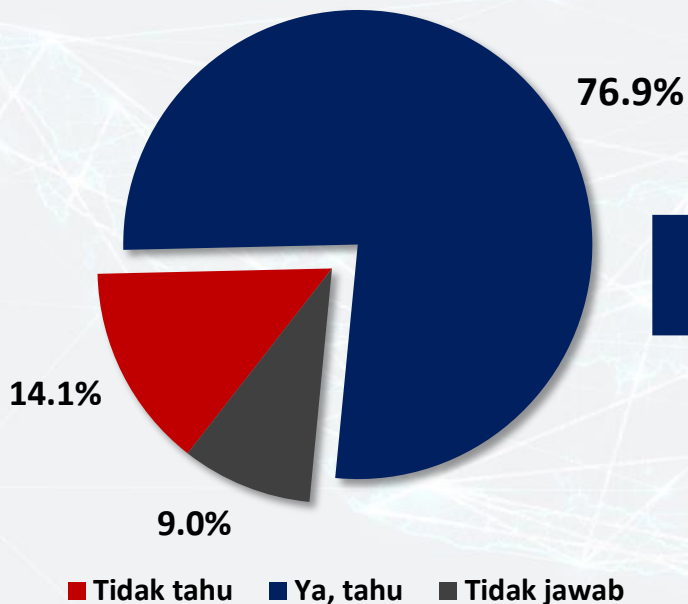
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PRABOWO - GIBRAN

Kedikenalan dan Keyakinan terhadap Koperasi Desa Merah Putih

21

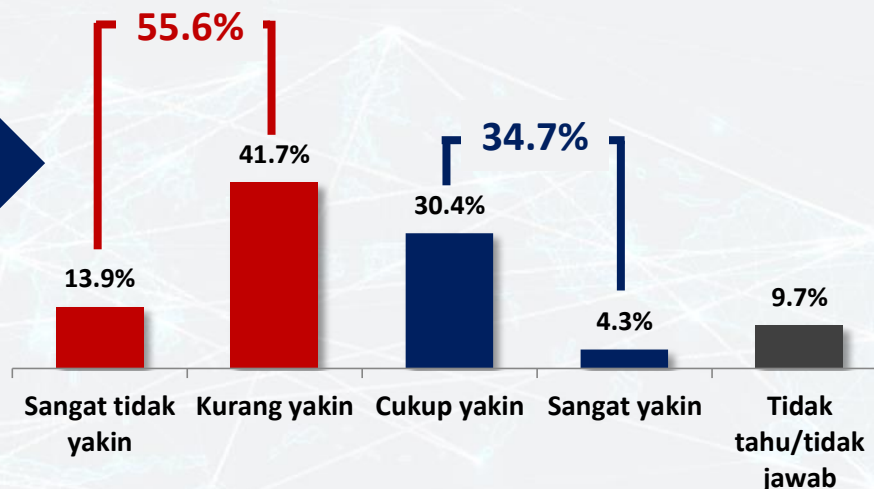


Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu/tidak tahu dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)?



Apakah Bapak/Ibu/Saudara yakin atau tidak yakin bahwa Koperasi Desa Merah Putih penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan?

Hanya yang menjawab Tahu (76.9%)



Sebanyak **(76.9%)** publik mengetahui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sedangkan **(14.1%)** mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengetahui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebanyak **(55.6%)** publik mengatakan tidak yakin (gabungan sangat tidak yakin dan kurang yakin) bahwa Koperasi Desa Merah Putih penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan, sedangkan **(34.7%)** publik mengatakan yakin (gabungan sangat yakin dan cukup yakin).

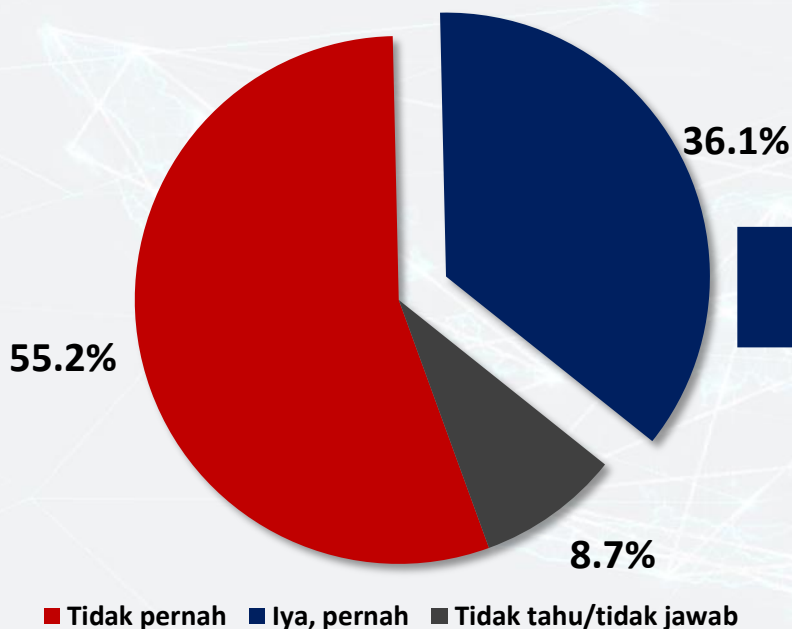
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PRABOWO - GIBRAN

Penerima Bantuan Sosial Selama Tahun 2026

22

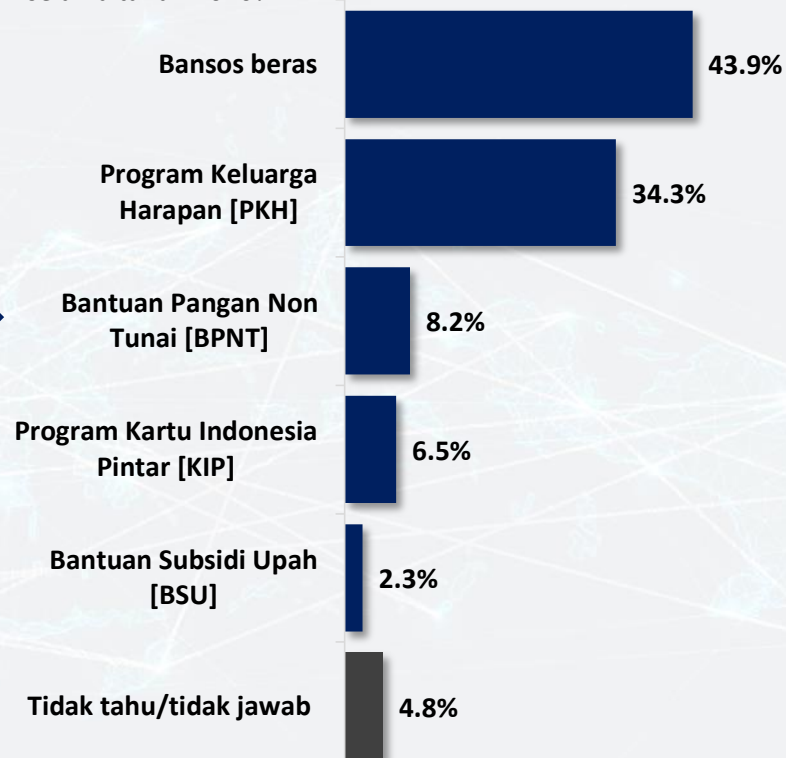


Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah menerima bantuan sosial [Bansos] selama tahun 2026?



[HANYA DITANYAKAN KEPADA YANG MENJAWAB IYA, PERNAH (36.1%)]

Bansos apa yang pernah Bapak/Ibu/Saudara dapatkan selama tahun 2026?



Sebanyak (55.2%) publik mengatakan tidak pernah menerima bansos selama tahun 2026, sedangkan (36.1%) mengatakan pernah menerima. Diantara yang pernah menerima bantuan sosial (bansos), bantuan sosial (bansos) yang didapatkan yakni Bansos beras (43.9%), Program Keluarga Harapan (PKH) (34.3%), dan Bantuan Pangan Non-Tunai [BPNT] (8.2%).



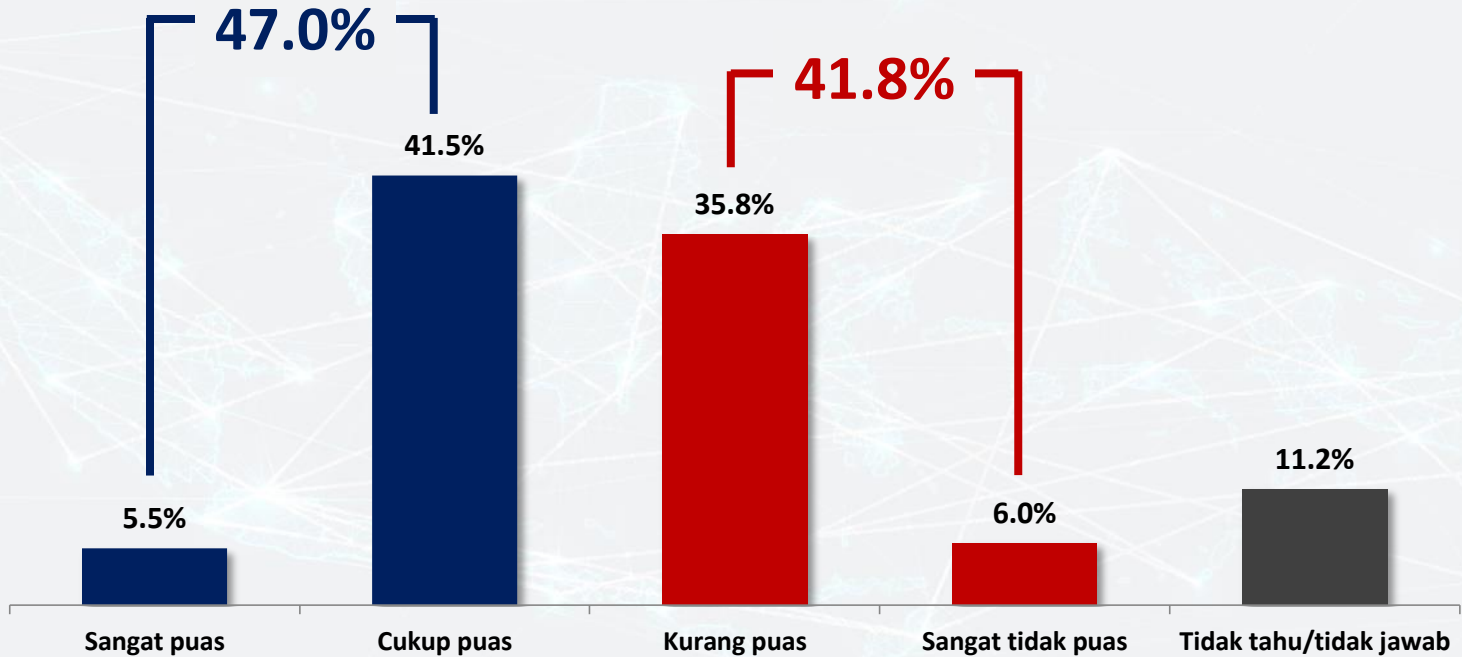
EVALUASI KINERJA KABINET MERAH PUTIH

EVALUASI KINERJA KABINET MERAH PUTIH

24

Tingkat Kepuasan Kinerja Menteri & Pejabat Pemerintahan Prabowo – Gibran

? Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja para menteri dan pejabat secara keseluruhan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini?



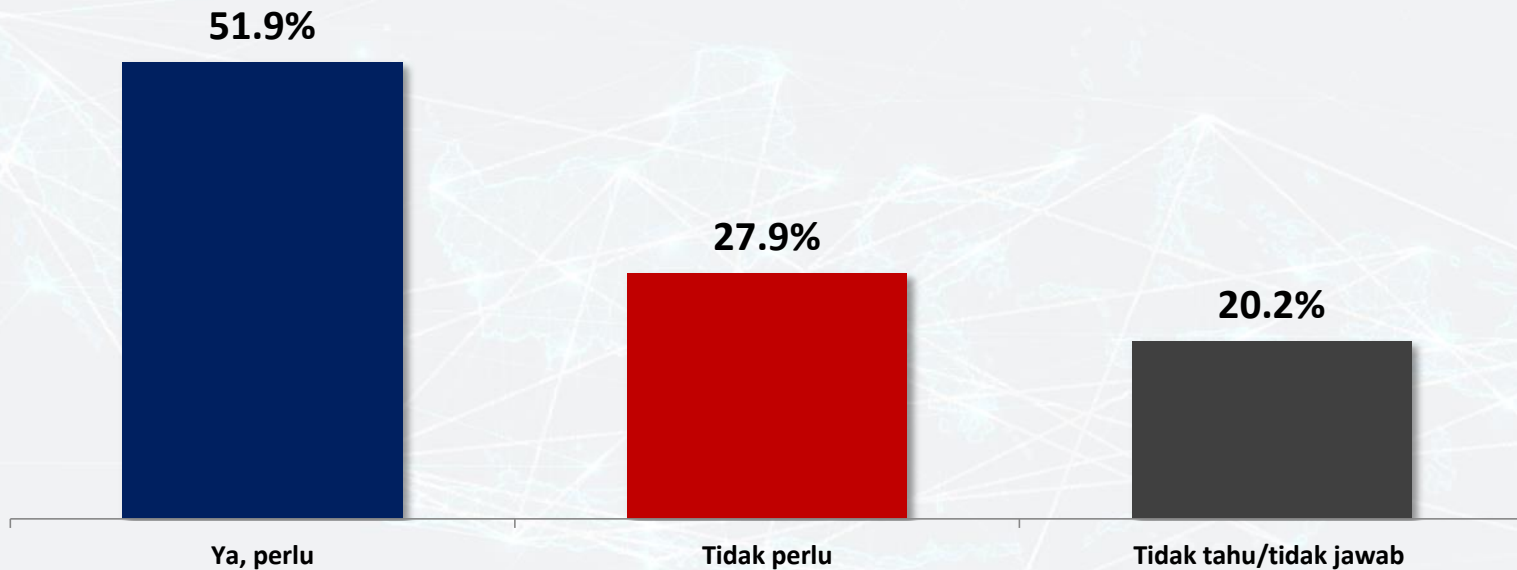
Sebanyak **(47.0%)** publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas) terhadap kinerja para menteri dan pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan **(41.8%)** publik mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas).

EVALUASI KINERJA KABINET MERAH PUTIH

Reshuffle Kabinet Merah Putih

25

? Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Pemerintahan Prabowo Subianto masih perlu melakukan perombakan/reshuffle kabinet?



Sebanyak **(51.9%)** publik mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto perlu melakukan perombakan/reshuffle kabinet, sedangkan **(27.9%)** mengatakan tidak perlu.

EVALUASI KINERJA KABINET MERAH PUTIH

26

Pertimbangan Bidang Menteri untuk di *Reshuffle*

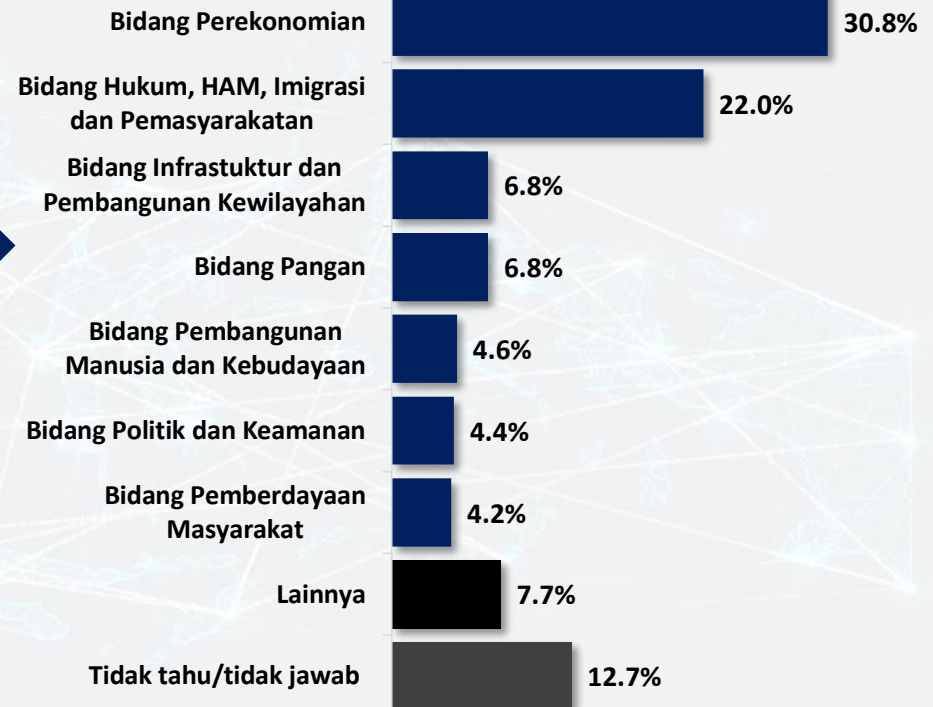
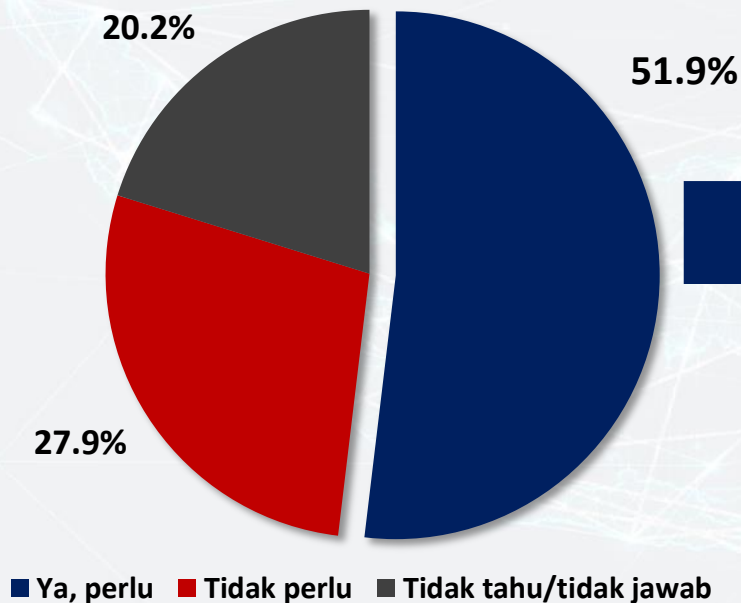


Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Pemerintahan Prabowo Subianto masih perlu melakukan perombakan/reshuffle kabinet?



[HANYA DITANYAKAN KEPADA YANG MENJAWAB
YA, PERLU (51.9%)

Menteri pada bidang berikut yang menurut Bapak/Ibu/Saudara harus di reshuffle/diganti oleh Presiden Prabowo Subianto?



Di antara yang mengatakan masih perlu perombakan/reshuffle kabinet (**51.9%**), bidang kementerian yang diinginkan untuk dilakukan perombakan/reshuffle, yakni Bidang Perekonomian (**30.8%**), Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (**22.0%**), serta Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan dan Bidang Pangan (**6.8%**).

EVALUASI KINERJA KABINET MERAH PUTIH

27

Alasan Menteri untuk di *Reshuffle*

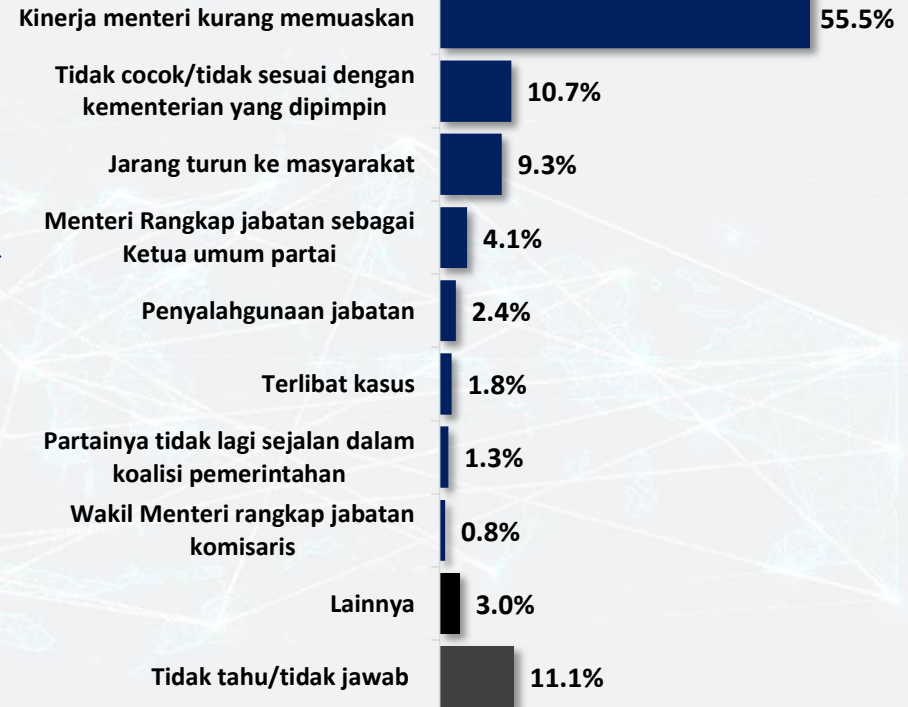
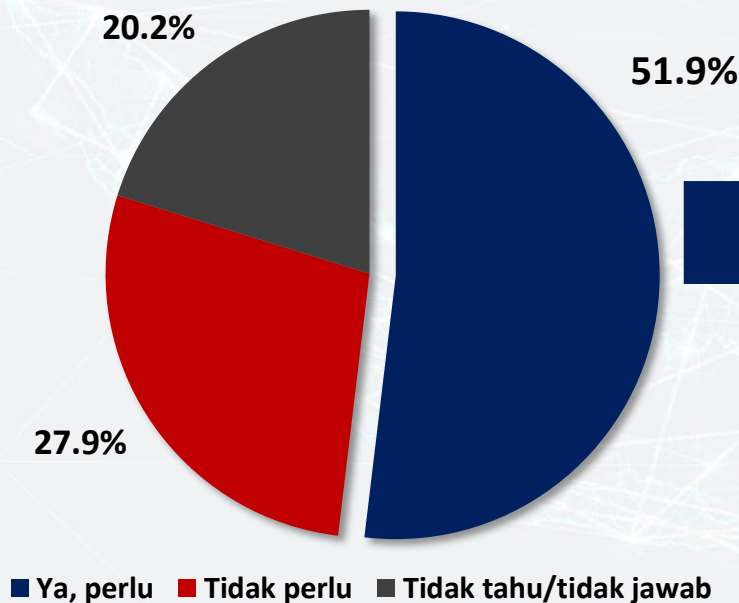


Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Pemerintahan Prabowo Subianto masih perlu melakukan perombakan/reshuffle kabinet?



[HANYA DITANYAKAN KEPADA YANG MENJAWAB
YA, PERLU (51.9%)]

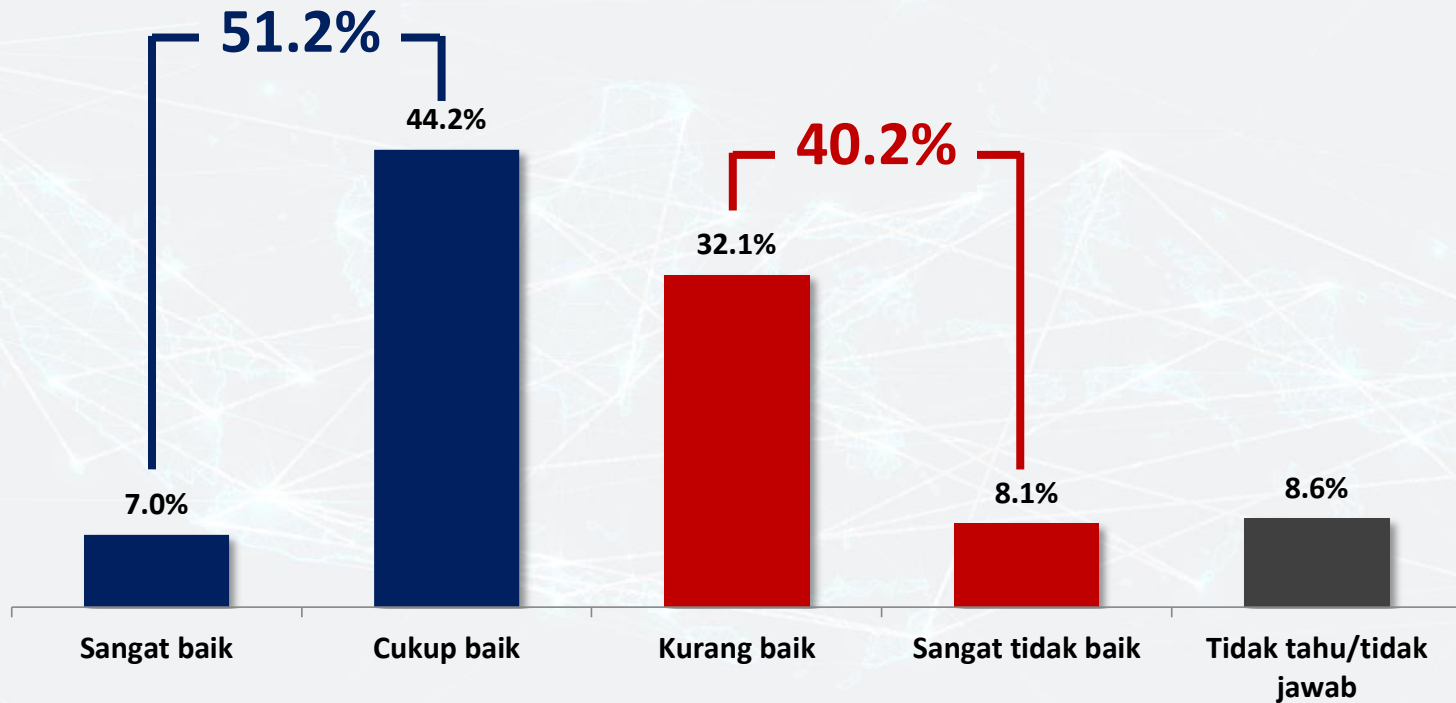
Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara sehingga Menteri pada Kabinet Merah Putih dipertimbangkan untuk di reshuffle/diganti?



Di antara yang mengatakan masih perlu perombakan/reshuffle kabinet (**51.9%**), alasan menteri tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan perombakan/reshuffle, yakni kinerja menteri kurang memuaskan (**55.5%**), tidak cocok/tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin (**10.7%**), dan jarang turun ke masyarakat (**9.3%**).

Penilaian Komunikasi Pemerintahan Prabowo - Gibran

? Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap gaya komunikasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyampaikan informasi kepada publik?



Sebanyak **(51.2%)** publik mengatakan baik (gabungan sangat baik dan cukup baik) dengan gaya komunikasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyampaikan informasi kepada publik, sedangkan **(40.2%)** publik mengatakan tidak baik (gabungan kurang baik dan sangat tidak baik).



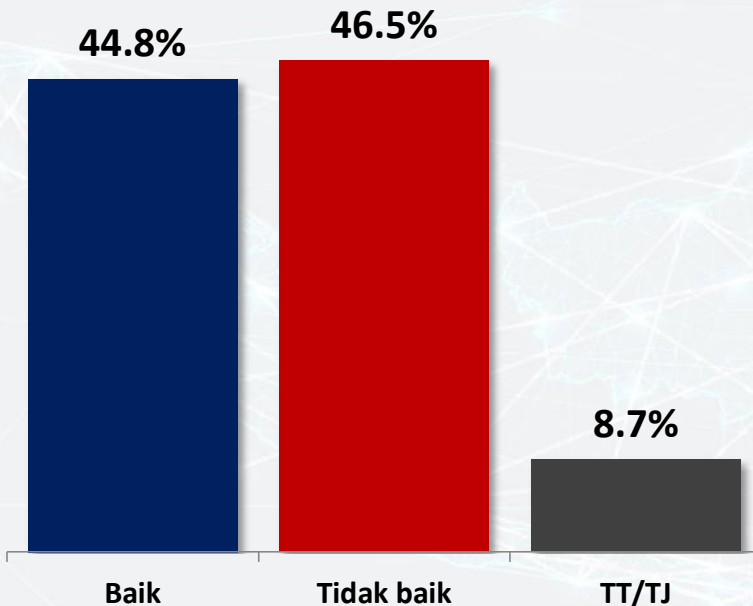
EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN DEMOKRASI

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN DEMOKRASI

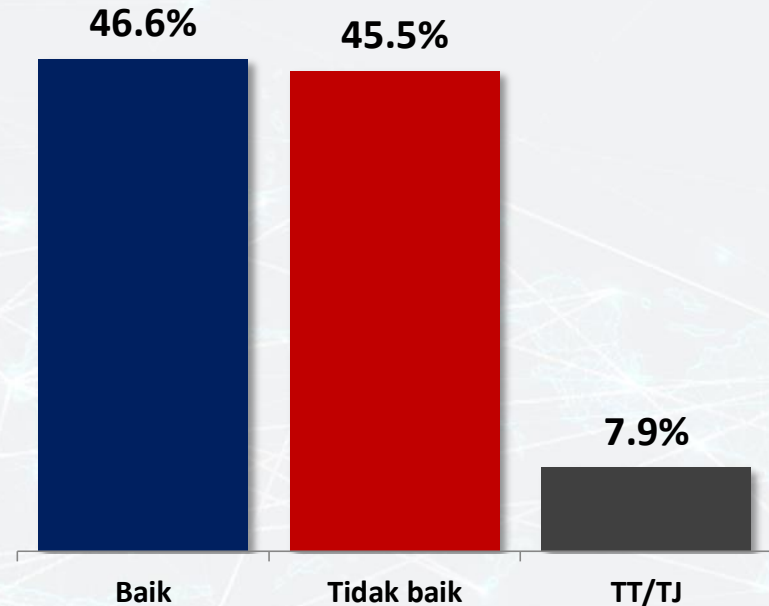
30

Penilaian terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Penegakan Hukum

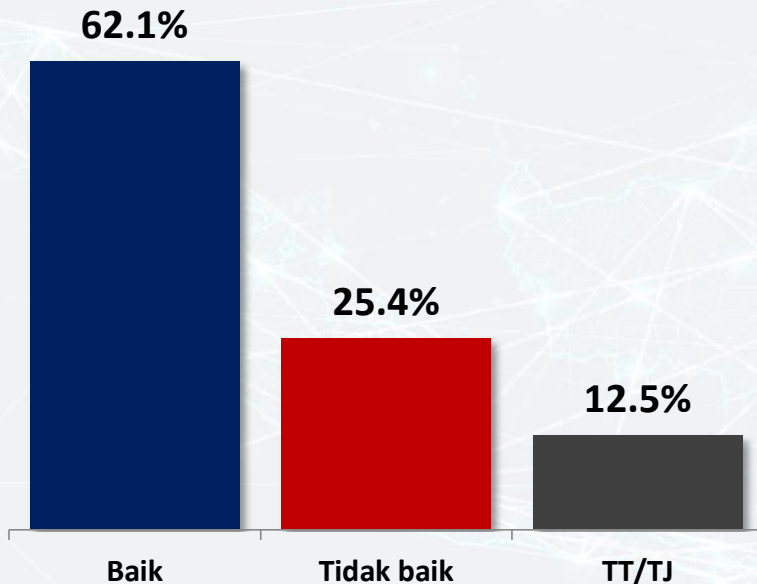


Pemberantasan Korupsi

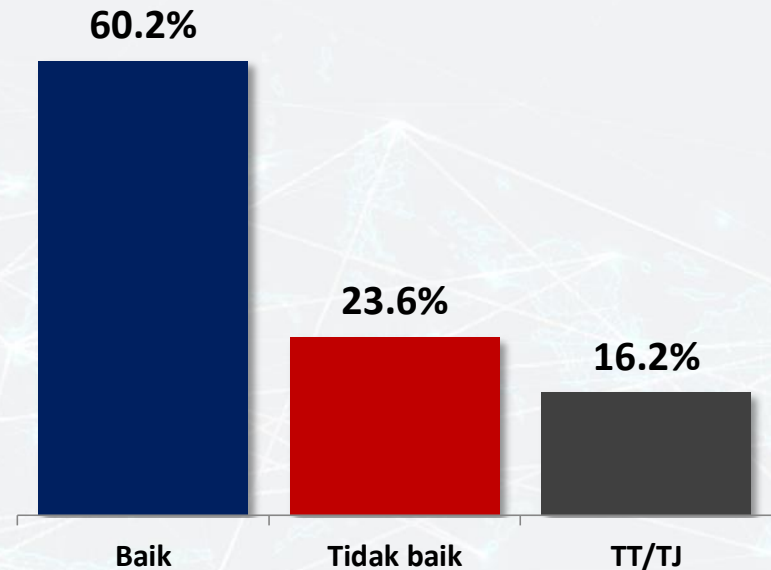


Sebanyak **(46.5%)** publik mengatakan tidak baik terhadap pelaksanaan penegakan hukum saat ini, sedangkan **(44.8%)** publik mengatakan baik. Sementara sebanyak **(46.6%)** publik mengatakan baik terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi saat ini, sedangkan **(45.5%)** publik mengatakan tidak baik.

Kebebasan Berpendapat



Kebebasan Pers



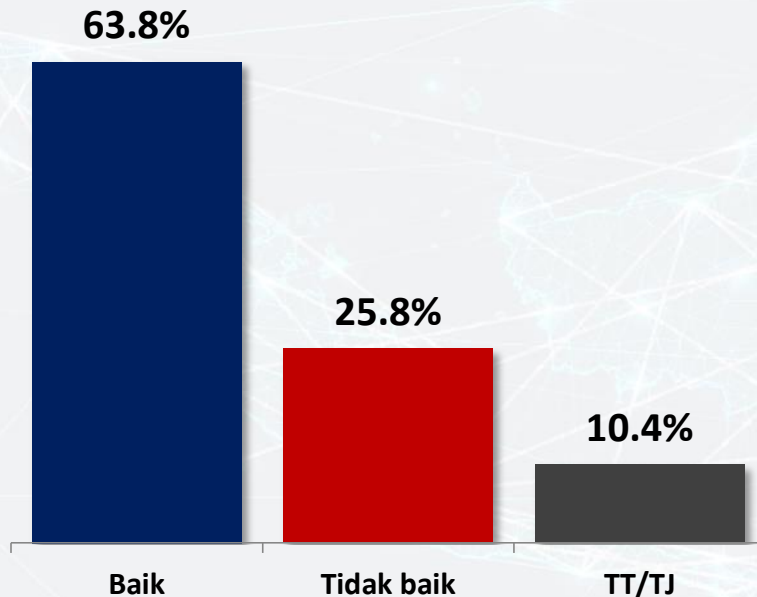
Sebanyak **(62.1%)** publik mengatakan baik terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat saat ini, sedangkan **(25.4%)** publik mengatakan tidak baik. Sementara sebanyak **(60.2%)** publik mengatakan baik terhadap pelaksanaan kebebasan pers saat ini, sedangkan **(23.6%)** publik mengatakan tidak baik.

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN DEMOKRASI

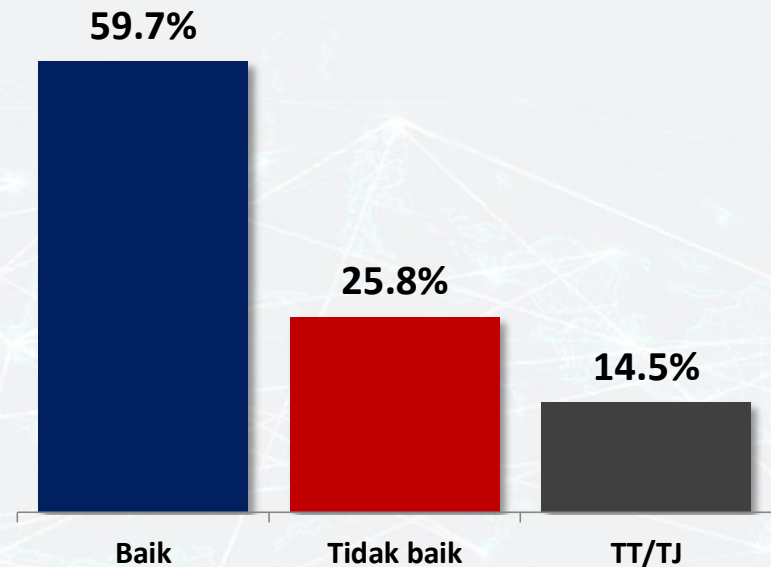
Penilaian terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi Keseluruhan

32

Kualitas Penyelenggaraan Pemilu



Demokrasi Keseluruhan



Sebanyak **(63.8%)** publik mengatakan baik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan **(25.8%)** publik mengatakan tidak baik. Sementara sebanyak **(59.7%)** publik mengatakan baik terhadap demokrasi secara keseluruhan sedangkan **(25.8%)** publik mengatakan tidak baik.

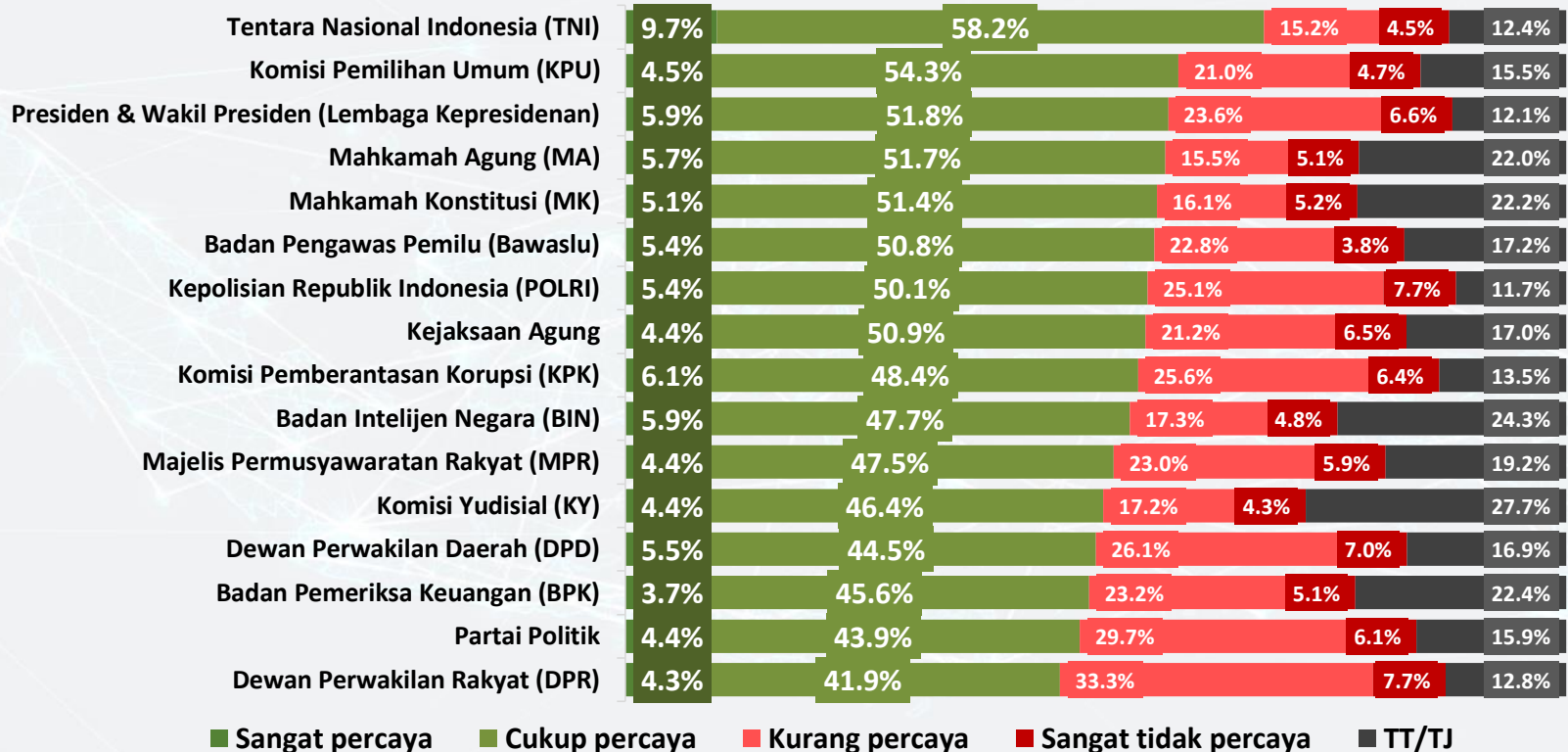
EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN DEMOKRASI

33

Tingkat Kepercayaan Lembaga Negara dan Institusi Demokrasi



Apakah Bapak/Ibu/Saudara **percaya** atau **tidak percaya** terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi di bawah ini?



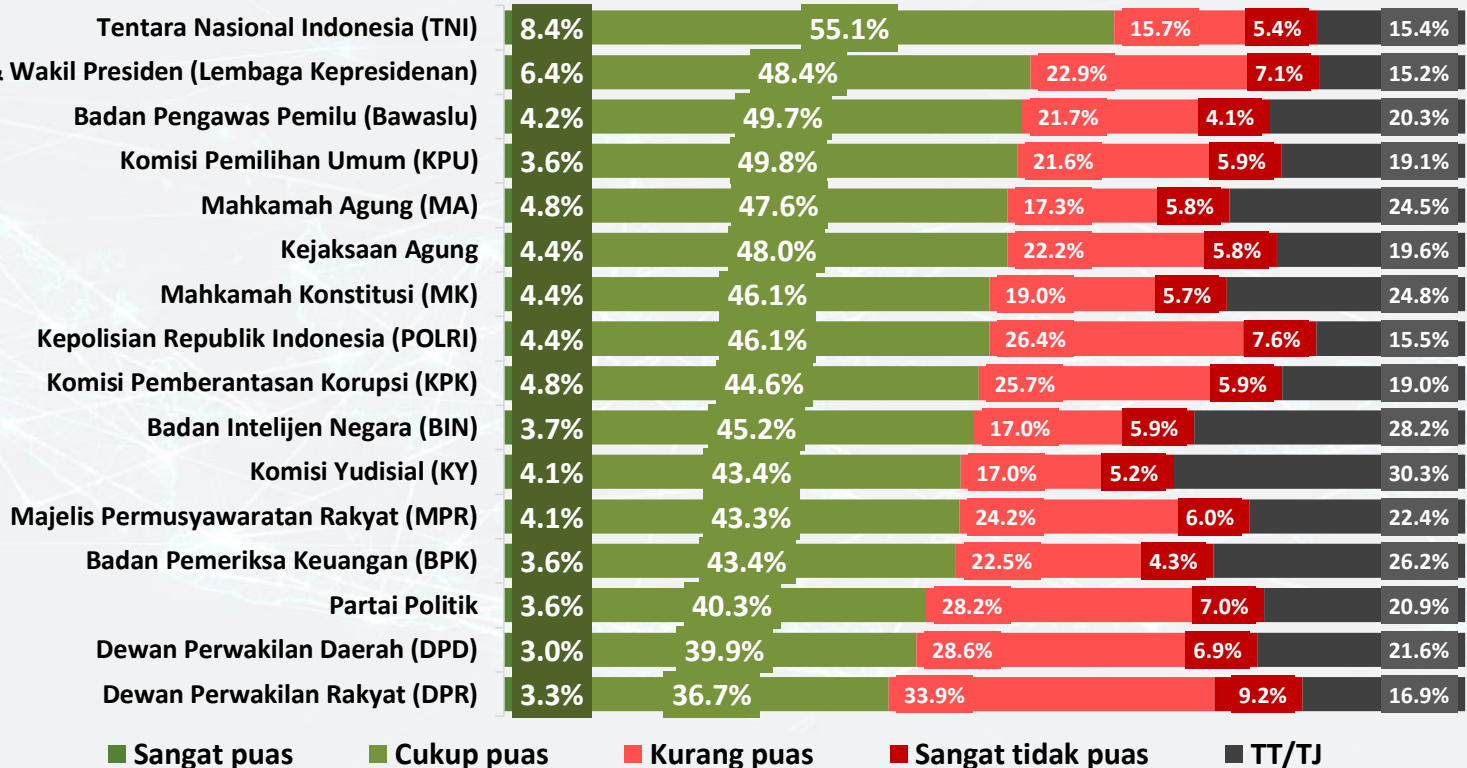
Sebanyak **(67.9%)** publik mengatakan percaya (gabungan sangat percaya dan cukup percaya) terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) **(58.8%)**, dan Presiden & Wakil Presiden (Lembaga Kepresidenan) **(57.7%)**.

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN DEMOKRASI

34

Tingkat Kepuasan Lembaga Negara dan Institusi Demokrasi

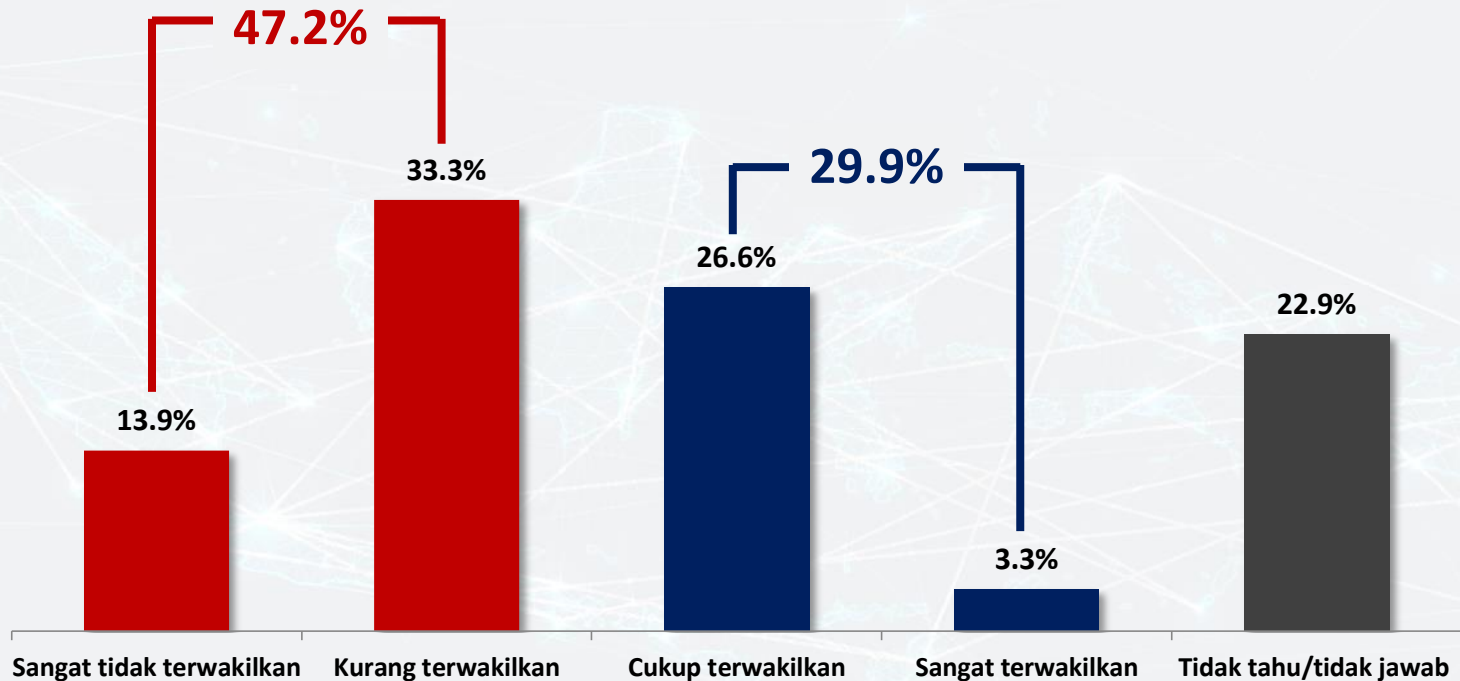
Apakah Bapak/Ibu/Saudara **puas atau tidak puas** terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi di bawah ini?



Sebanyak **(63.5%)** publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas) terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), diikuti Presiden & Wakil Presiden (Lembaga Kepresidenan) **(54.8%)**, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) **(53.9%)**.



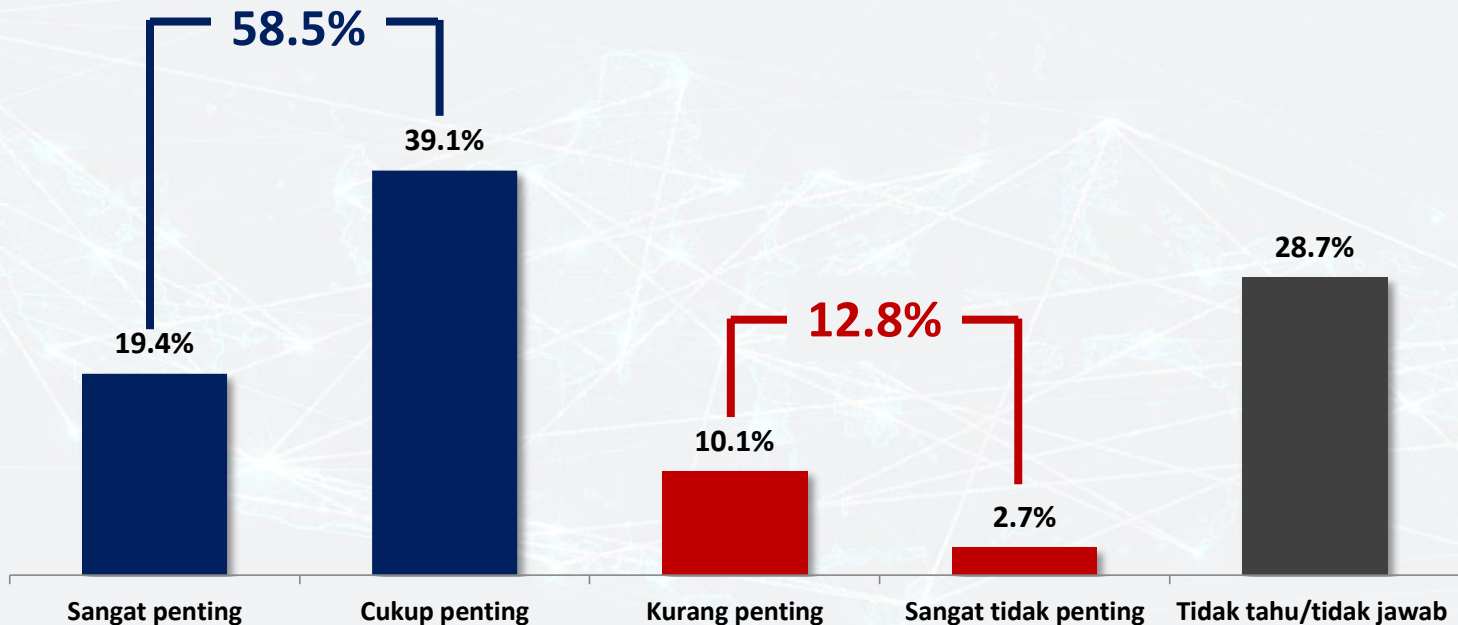
Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa terwakilkan oleh partai politik saat ini?



Sebanyak **(47.2%)** publik merasa tidak terwakilkan (gabungan sangat tidak terwakilkan dan kurang terwakilkan) oleh partai politik saat ini, sedangkan **(29.9%)** publik merasa terwakilkan (gabungan cukup terwakilkan dan terwakilkan).

Keberadaan Partai Oposisi

? Menurut Bapak/Ibu/Saudara, seberapa penting keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah saat ini?

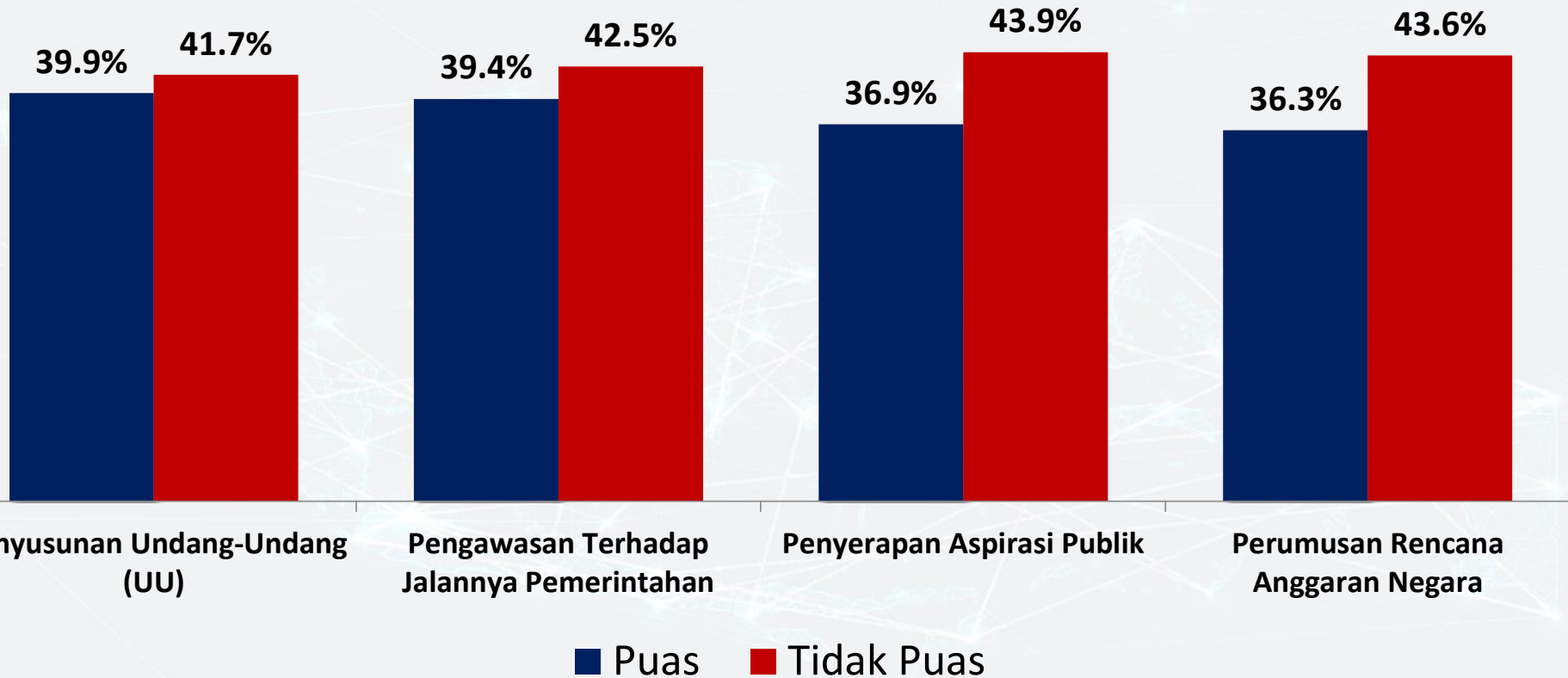


Sebanyak **(58.5%)** publik mengatakan penting (gabungan sangat penting dan cukup penting) keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah saat ini, sedangkan **(12.8%)** publik mengatakan tidak penting (gabungan kurang penting dan sangat tidak penting).

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN DEMOKRASI

Perbandingan Tingkat Kepuasan Kinerja Fungsi Utama DPR

37



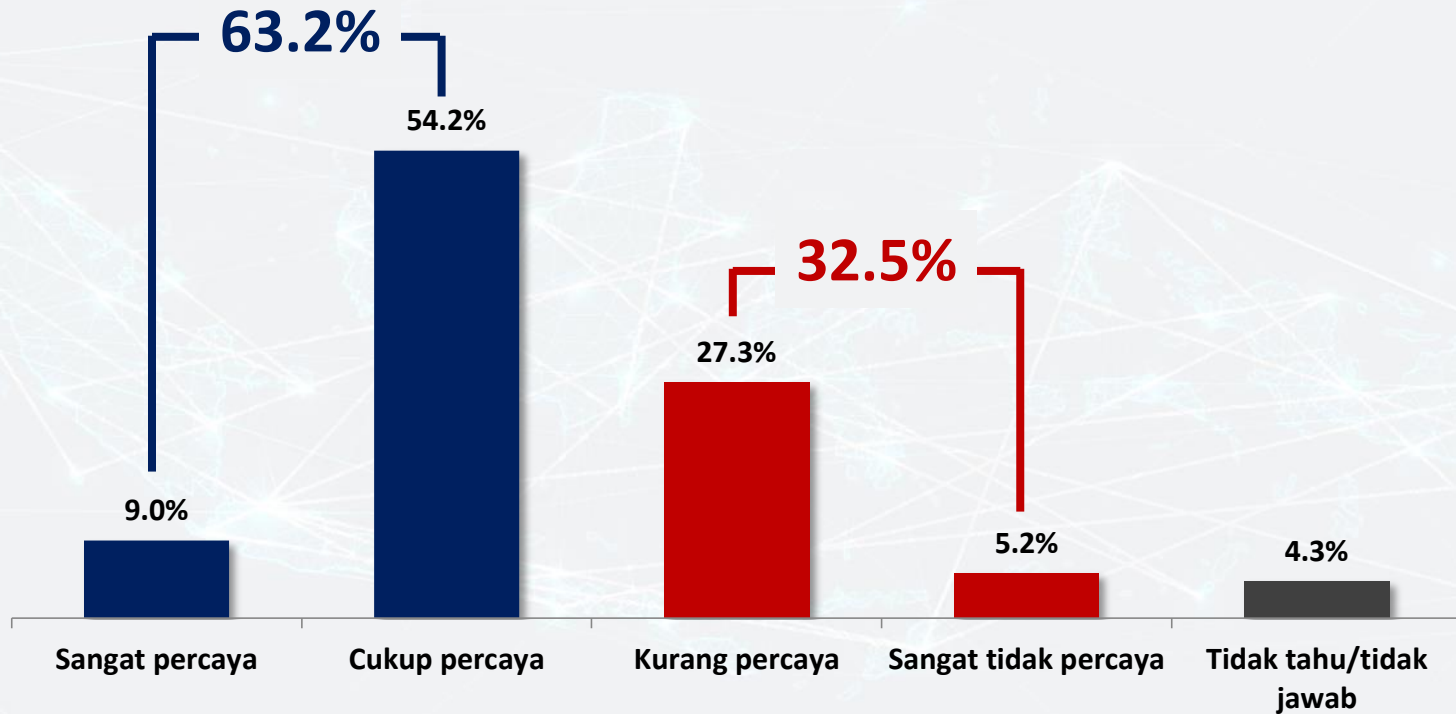
Publik merasa puas terhadap kinerja fungsi utama DPR pada Penyusunan Undang-Undang (UU) (39.9%), Pengawasan Terhadap Jalannya Pemerintahan (39.4%), Penyerapan Aspirasi Publik (36.9%), dan Perumusan Rencana Anggaran Negara (36.3%).



EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

Tingkat Kepercayaan Pemerintahan Prabowo – Gibran

? Apakah Bapak/Ibu/Saudara **percaya** dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini?

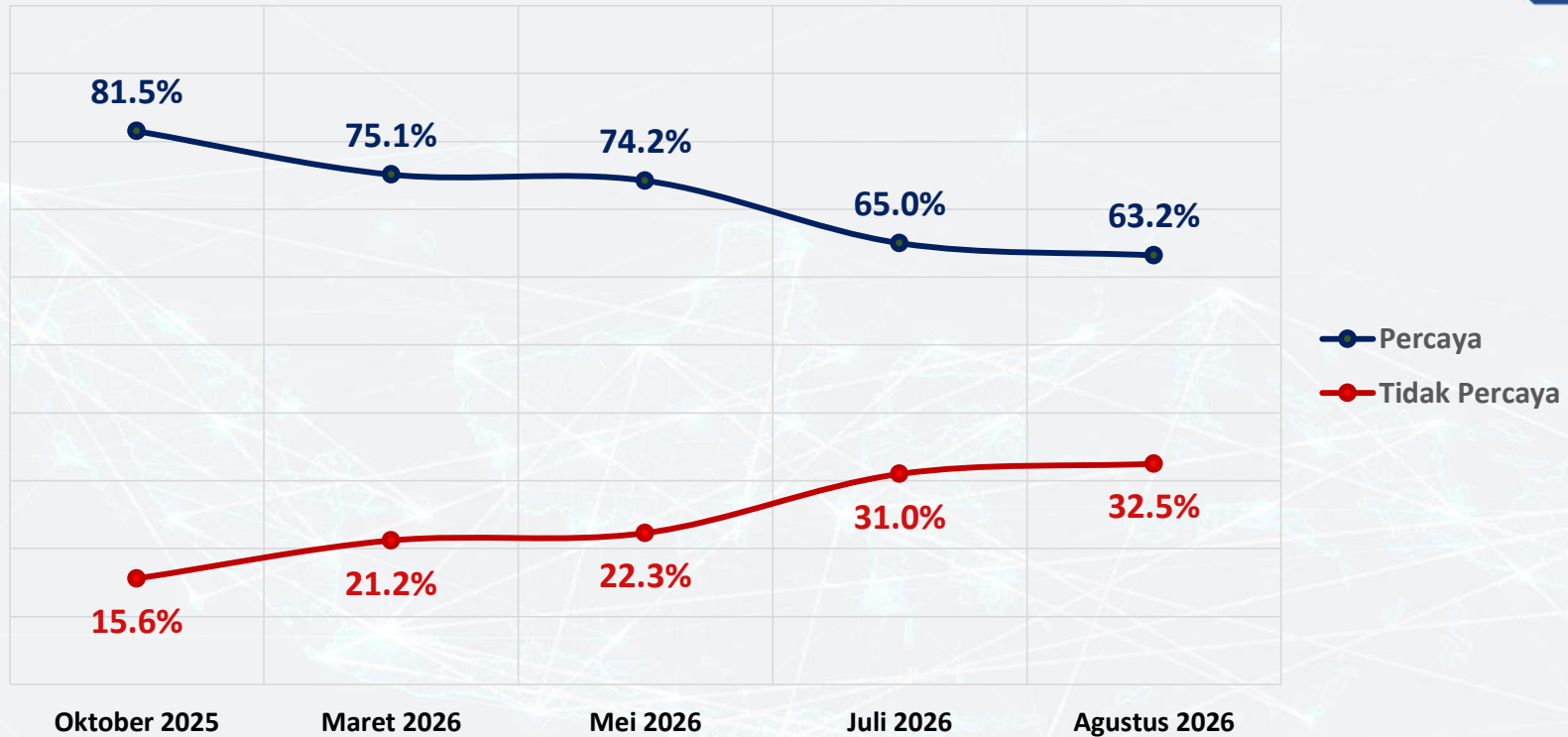


Sebanyak **(63.2%)** publik mengatakan percaya (gabungan sangat percaya dan cukup percaya) dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan **(32.5%)** publik mengatakan tidak percaya (gabungan kurang percaya dan sangat tidak percaya).

TREN KEPERCAYAAN PEMERINTAHAN PRABOWO - GIBRAN

Tren Setahun Terakhir (Oktober 2025-Agustus 2026)

40



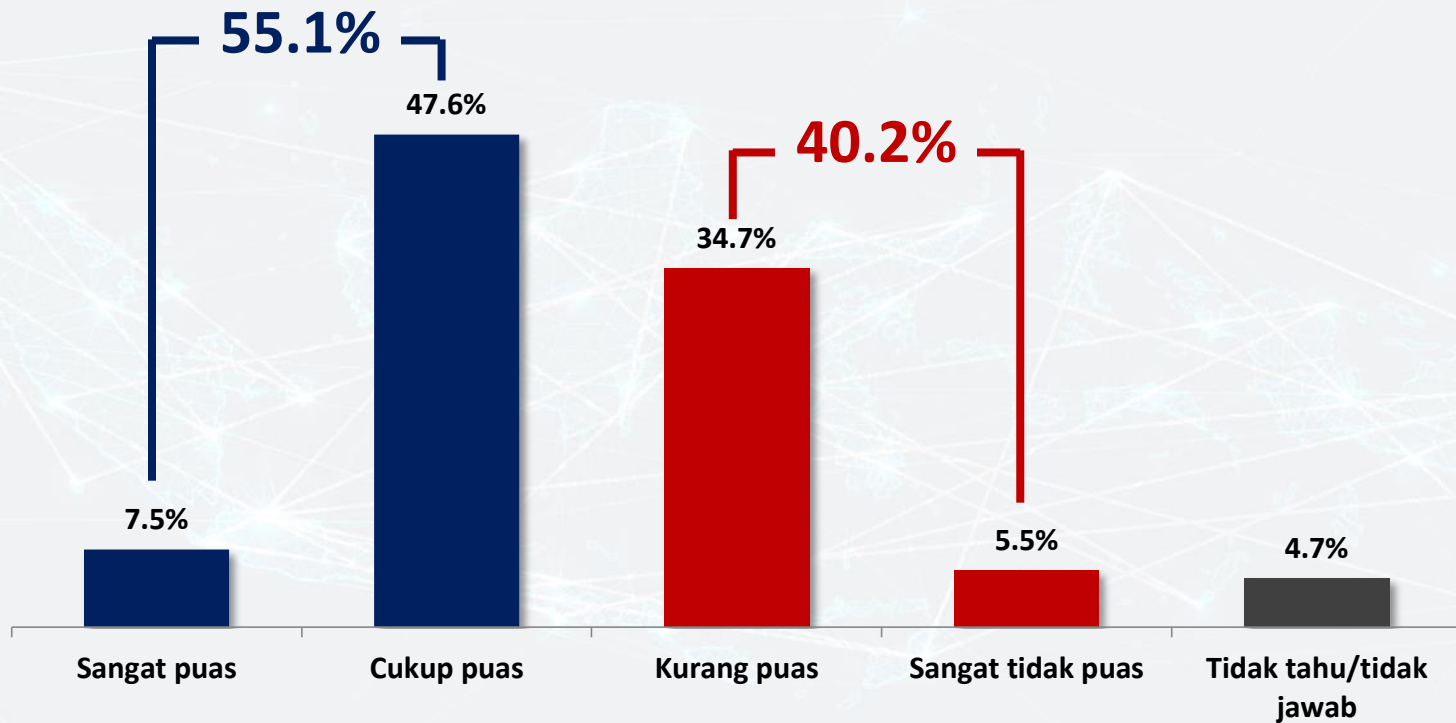
Tren tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka Agustus 2026 cenderung menurun dibanding bulan Maret, Mei dan Juli 2026.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintahan Prabowo – Gibran

41

? Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap **kinerja** pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini?

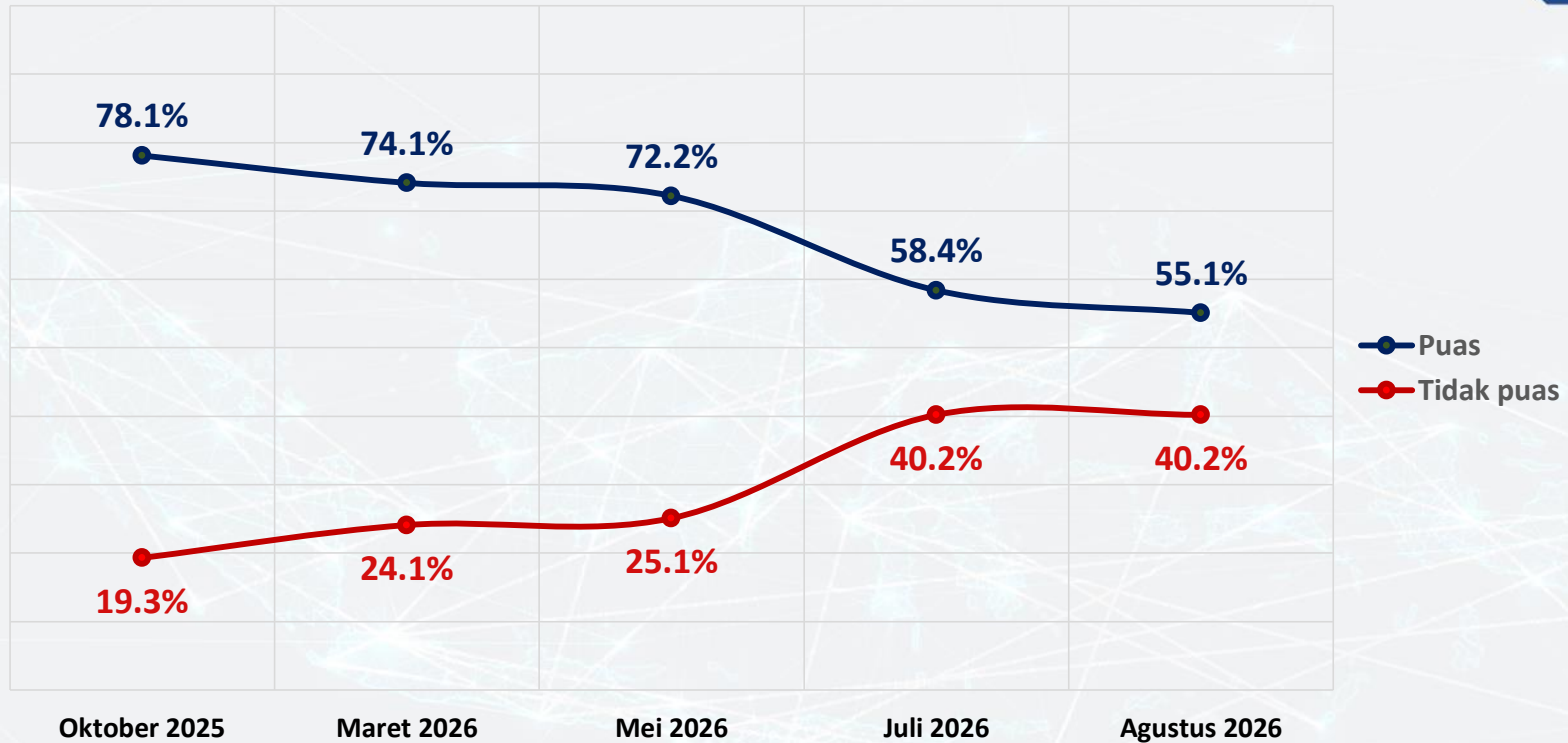


Sebanyak **(55.1%)** publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan **(40.2%)** publik mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas).

TREN KEPUASAN PEMERINTAHAN PRABOWO - GIBRAN

Tren Setahun Terakhir (Oktober 2025-Agustus 2026)

42

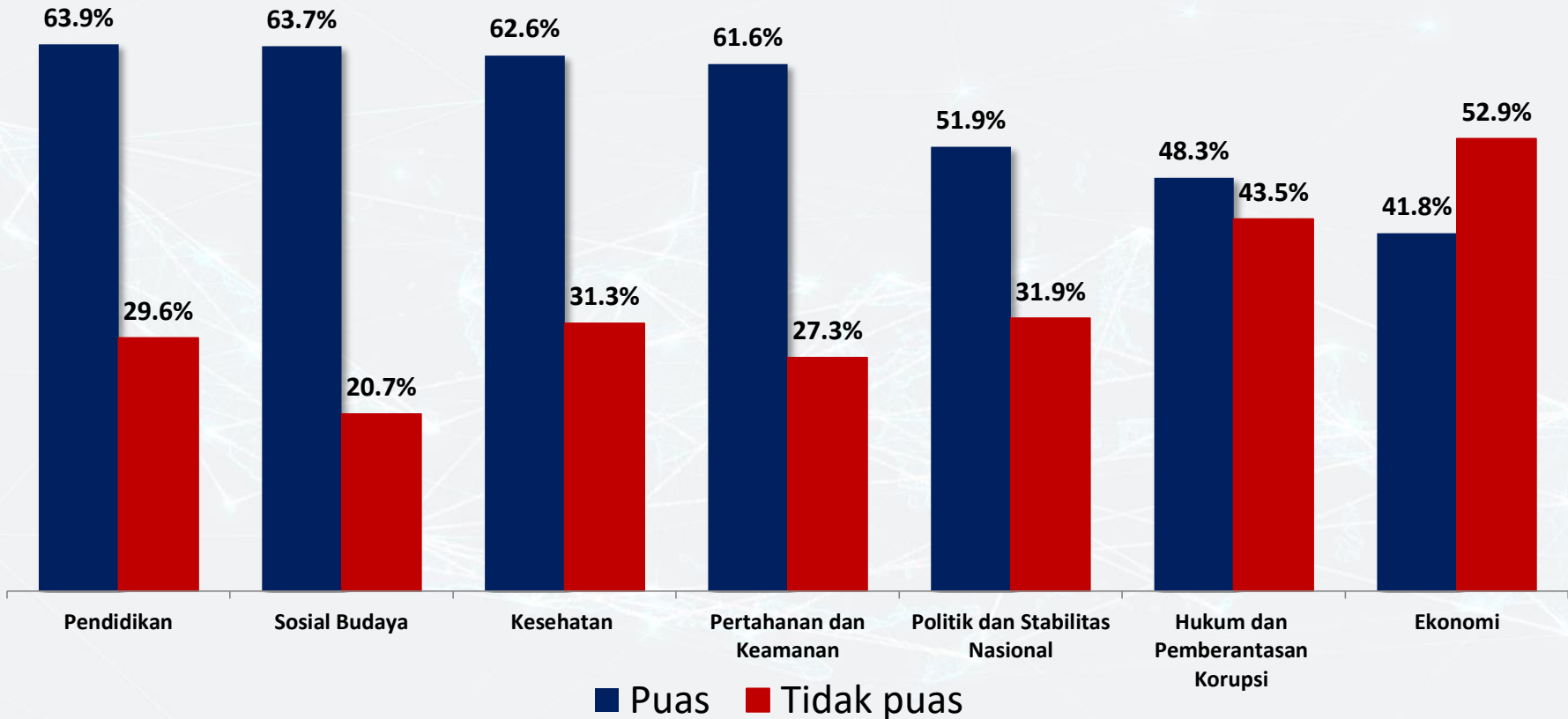


Tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka Agustus 2026 cenderung menurun dibanding bulan Maret, Mei dan Juli 2026.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Perbandingan Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintahan Berbagai Bidang

43



Publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bidang Pendidikan (**63.9%**), Sosial Budaya (**63.7%**), Kesehatan (**62.6%**), Pertahanan dan Keamanan (**61.6%**), Politik dan Stabilitas Nasional (**51.9%**), Hukum dan Pemberantasan Korupsi (**48.3%**), serta Bidang Ekonomi adalah yang paling rendah tingkat kepuasannya (**41.8%**)



PETA SEBARAN (CROSSTAB) EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Berdasarkan Wilayah

45

Wilayah	Sebaran Cluster	Puas (Cukup puas dan Sangat puas)	Tidak puas (Kurang puas dan Sangat tidak puas)	TT/TJ
Berdasarkan Wilayah				
Sumatera	20.3%	47.2%	48.4%	4.4%
Jawa Barat	16.7%	55.7%	42.9%	1.4%
Jawa Timur	15.0%	57.7%	39.9%	2.4%
Jawa Tengah – DIY	14.9%	53.1%	36.8%	10.1%
DKI Jakarta – Banten	8.2%	59.0%	34.3%	6.7%
Sulawesi	7.3%	63.1%	27.3%	9.6%
Kalimantan	6.4%	64.8%	34.0%	1.2%
Bali – Nusa	4.8%	81.9%	15.1%	3.0%
Maluku - Papua	6.4%	34.7%	61.2%	4.1%

Keterangan: ■ Kepuasan Unggul ■ Imbang

Crosstab ini menggambarkan peta persebaran kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berdasarkan wilayah. Publik di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah – DIY, DKI Jakarta – Banten, Sulawesi, Kalimantan dan Bali – Nusa cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Publik di wilayah Maluku – Papua cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan publik di wilayah Sumatera cenderung berimbang.

*)Margin of Error (MoE) membesar lebih dari 5.8%, karena sampel terbagi semakin kecil dalam setiap kategori. Sehingga data yang tersaji adalah data indikatif.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Berdasarkan Gender, Agama, dan Pendidikan

46

Demografi	Sebaran Cluster	Puas (Cukup puas dan Sangat puas)	Tidak puas (Kurang puas dan Sangat tidak puas)	TT/TJ
Berdasarkan Gender				
Laki-laki	50.0%	55.7%	40.6%	3.7%
Perempuan	50.0%	54.6%	39.9%	5.5%
Berdasarkan Agama				
Islam	84.6%	53.9%	41.0%	5.1%
Protestan & Katolik	12.5%	59.9%	38.7%	1.4%
Lainnya	2.9%	71.3%	23.3%	5.4%
Berdasarkan Pendidikan				
≤ SD	36.2%	56.8%	37.3%	5.9%
SMP	22.7%	55.5%	39.3%	5.2%
SMA	30.9%	55.8%	42.0%	2.2%
Diploma dan Sarjana	10.2%	46.5%	47.3%	6.2%

Keterangan:  Kepuasan Unggul  Imbang

Crosstab ini menggambarkan peta persebaran kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berdasarkan Gender, Agama dan Pendidikan. Pada pemilih laki-laki dan perempuan, semua agama, dan jenjang pendidikan lulus SD atau lebih rendah, lulus SMP dan SMA, publik cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan pemilih dengan jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana cenderung berimbang.

*)Margin of Error (MoE) membesar lebih dari 5.8%, karena sampel terbagi semakin kecil dalam setiap kategori. Sehingga data yang tersaji adalah data indikatif.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Berdasarkan Pekerjaan

47

Pekerjaan	Sebaran Cluster	Puas (Cukup puas dan Sangat puas)	Tidak puas (Kurang puas dan Sangat tidak puas)	TT/TJ
Berdasarkan Pekerjaan				
Ibu rumah tangga	26.9%	54.1%	38.9%	7.0%
Buruh, Sopir, Kernet, Honorer, Pekerja tidak tetap, Sedang mencari pekerjaan/menganggur	20.0%	58.6%	37.8%	3.6%
Petani, Nelayan, Peternak	19.4%	63.1%	32.3%	4.6%
Pedagang kecil, Pejabat, Pengusaha, Wiraswasta, Profesional	13.0%	48.4%	47.4%	4.2%
Pelajar/Mahasiswa	9.7%	44.5%	55.1%	0.4%
Pengajar, Karyawan swasta, Karyawan BUMN, PNS	7.3%	55.7%	40.0%	4.3%
TT/TJ	3.7%	52.3%	41.0%	6.7%

Keterangan:  Kepuasan Unggul  Imbang

Crosstab ini menggambarkan peta persebaran kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berdasarkan pekerjaan. Ibu rumah tangga, buruh, sopir, kernet, honorer, pekerja tidak tetap, sedang mencari pekerjaan/menganggur, petani, nelayan, peternak, dan pengajar, karyawan swasta, karyawan BUMN, PNS, cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sementara pelajar/mahasiswa cenderung tidak puas, sedangkan publik yang bekerja sebagai pedagang kecil, pejabat, pengusaha, wiraswasta, profesional, cenderung berimbang.

*)Margin of Error (MoE) membesar lebih dari 5.8%, karena sampel terbagi semakin kecil dalam setiap kategori. Sehingga data yang tersaji adalah data indikatif.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Berdasarkan Partai Politik

48

Partai Politik	Sebaran Cluster	Puas (Cukup puas dan Sangat puas)	Tidak puas (Kurang puas dan Sangat tidak puas)	TT/TJ
Berdasarkan Partai Politik				
Partai Gerindra	23.2%	75.3%	23.7%	1.0%
PDI Perjuangan	11.6%	50.0%	47.2%	2.8%
Partai Golkar	10.4%	51.2%	44.1%	4.7%
PKB	6.2%	60.5%	35.5%	4.0%
Partai Demokrat	6.1%	33.8%	64.9%	1.3%
Partai NasDem	4.4%	57.4%	40.7%	1.9%
PAN	3.4%	43.9%	56.0%	0.1%
PKS	3.3%	37.5%	62.4%	0.1%
Partai Lainnya	6.1%	52.1%	46.6%	1.3%
TT/TJ	25.3%	38.7%	47.7%	13.6%

Keterangan:  Kepuasan Unggul  Imbang

Crosstab ini menggambarkan peta persebaran kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berdasarkan pilihan partai politik. Pemilih dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB dan Partai NasDem cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, sedangkan pemilih Partai Demokrat, PAN dan PKS cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sementara pemilih PDI Perjuangan cenderung berimbang.

*)Margin of Error (MoE) membesar lebih dari 5.8%, karena sampel terbagi semakin kecil dalam setiap kategori. Sehingga data yang tersaji adalah data indikatif.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Berdasarkan Pilihan Pilpres 2024

49

Pilpres 2024	Sebaran Cluster	Puas (Cukup puas dan Sangat puas)	Tidak puas (Kurang puas dan Sangat tidak puas)	TT/TJ
Berdasarkan Pilihan Pilpres 2024				
Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar	17.3%	35.8%	60.6%	3.6%
Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	52.1%	67.6%	29.2%	3.2%
Ganjar Pranowo – Mahfud MD	6.1%	38.4%	60.9%	0.7%
TT/TJ	24.5%	46.5%	44.0%	9.5%

Keterangan:  Kepuasan Unggul  Imbang

Crosstab ini menggambarkan peta persebaran kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berdasarkan pilihan pada Pilpres 2024. Pemilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, sedangkan pemilih Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

*)Margin of Error (MoE) membesar lebih dari 5.8%, karena sampel terbagi semakin kecil dalam setiap kategori. Sehingga data yang tersaji adalah data indikatif.

KESIMPULAN

- ❑ **Kesimpulan Pertama.** Terkait kondisi ekonomi keuangan rumah tangga saat ini, **(57.1%)** publik mengatakan baik, sedangkan **(34.1%)** publik mengatakan tidak baik. Di sisi lain, **(62.5%)** publik mengatakan lebih banyak pengeluaran rumah tangga saat ini dibanding tahun lalu, sedangkan **(27.7%)** publik mengatakan lebih sedikit. Mayoritas publik atau **(55.6%)** mengatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir dan hanya **(38.3%)** publik mengatakan terjangkau. Persoalan paling pokok yang dirasakan publik saat ini, yakni harga-harga kebutuhan pokok mahal **(44.3%)**, sebagai persoalan tertinggi dibanding persoalan lain, di bawah 10%. Selain itu, lapangan kerja menjadi program yang dinilai paling tidak berhasil ditangani pemerintah. **(57.3%)** publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran, dan hanya **(32.2%)** yang mengatakan berhasil.
- ❑ **Kesimpulan Kedua.** Popularitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai **(93.9%)**, di antara publik yang tahu dengan program MBG, **(49.2%)** publik mengatakan tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis [MBG], sedangkan **(46.4%)** publik mengatakan puas. Sementara itu, sebanyak **(44.6%)** publik mengatakan program MBG tidak perlu dilanjutkan dan **(42.1%)** mengatakan harus tetap dilanjutkan. Sedangkan terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebanyak **(76.9%)** publik sudah tahu tentang program tersebut, namun **(55.6%)** publik mengatakan tidak yakin KDMP bisa menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan sesuai dengan tujuannya, dan hanya **(34.7%)** publik yang mengatakan yakin.

- ❑ **Kesimpulan Ketiga.** Sebanyak **(47.0%)** publik mengatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan **(41.8%)** publik mengatakan tidak puas. Sebanyak **(51.9%)** publik mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto perlu melakukan perombakan/reshuffle kabinet, sedangkan **(27.9%)** mengatakan tidak perlu. Di antara yang mengatakan masih perlu perombakan/reshuffle di Kabinet Merah Putih, bidang kementerian yang harus dilakukan perombakan/reshuffle, yakni Bidang Perekonomian **(30.8%)**, Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan **(22.0%)**, serta Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan dan Bidang Pangan **(6.8%)**. Alasan utama publik menginginkan perombakan/reshuffle kabinet karena kinerja menteri kurang memuaskan **(55.5%)**, diikuti tidak cocok/ tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin **(10.7%)**, dan jarang turun ke masyarakat **(9.3%)**. Di sisi lain, **(51.2%)** publik mengatakan baik dengan gaya komunikasi pemerintah dan kementerian dalam menyampaikan informasi di depan publik, sedangkan **(40.2%)** publik mengatakan tidak baik.

- ❑ **Kesimpulan Keempat.** Bidang Penegakan Hukum (**44.8%**) dan Pemberantasan Korupsi (**46.6%**) merupakan dua bidang paling rendah penilaiannya di banding bidang-bidang lainnya. Sementara kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (**46.2%**) dan Partai Politik (**48.3%**) paling rendah dibanding lembaga dan institusi demokrasi lainnya. Sebanyak (**47.2%**) publik mengatakan merasa tidak terwakilkan oleh partai politik saat ini, sedangkan (**29.9%**) publik mengatakan terwakilkan, sehingga keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah dinilai penting oleh publik. Sebanyak (**58.5%**) publik mengatakan penting keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah saat ini, sedangkan hanya (**12.8%**) publik mengatakan tidak penting.
- ❑ **Kesimpulan Kelima.** Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (**63.2%**), sementara tingkat kepuasan publik kepada Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran (**55.1%**). Tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka Agustus 2026 cenderung menurun dibanding bulan Maret, Mei dan Juli 2026.

5 FAKTOR PEMICU PENURUNAN TREN KEPUASAN PUBLIK

Dari temuan dan kesimpulan tersebut, terdapat 5 faktor pemicu penurunan approval rating Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan analisis kritis sebagai berikut:

1. Tekanan Ekonomi dan Melemahnya Daya Beli Publik

a. Harga-harga Kebutuhan Pokok

Harga kebutuhan pokok yang mahal (**44.3%**), saat ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat secara langsung. Konsekuensi dari kenaikan kebutuhan pokok berimbas pada kenaikan biaya hidup. Di mana data survei ini menunjukkan (**62.5%**) publik menyatakan pengeluaran selama satu tahun terakhir meningkat. Fakta ini menciptakan tekanan finansial yang nyata bagi publik. Sebab pendapatan masyarakat satu tahun terakhir yang menyatakan baik (**58.7%**) tidak sebanding atau lebih rendah dibandingkan dengan publik yang menyatakan (**62.5%**) pengeluaran rumah tangganya lebih banyak atau cenderung lebih tinggi daripada pendapatannya. Akhirnya, daya beli publik merosot tajam dan memicu rasa ketidakpuasan yang makin membesar terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pada bidang ekonomi secara umum.

b. Sulitnya Lapangan Kerja

Kondisi ekonomi yang semakin sulit tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Data survei menggambarkan pemerintah saat ini dinilai tidak berhasil **(51.6%)** dalam menciptakan lapangan kerja dan **(57.3%)** publik menyatakan pemerintah tidak berhasil dalam menurunkan angka pengangguran. Artinya, sulitnya lapangan kerja menjadi faktor pemicu kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tanpa adanya jaminan penghasilan yang pasti dalam keluarga, maka dapat terjadi penekanan dalam ketahanan ekonomi keluarga Indonesia. Disisi lain, publik punya ekspektasi besar terhadap pemerintah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan "menyelamatkan" kondisi ekonomi keluarga.

2. Problem Implementasi Program Prioritas Pemerintah

a. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pada awalnya, sempat menjadi komoditas politik utama, yang sukses mengantarkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menuju panggung kekuasaan dengan memenangkan Pilpres 2024 lalu. Namun, ternyata implementasi dari program MBG menuai banyak masalah. Dari kasus keracunan massal, kualitas makanan rendah, mismanajemen, dan seterusnya. Termasuk yang paling ramai skandal kasus korupsi yang menyeret jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Rangkaian polemik tersebut merusak reputasi MBG secara masif. Efeknya, memicu gelombang sentimen negatif yang kian mendominasi di ruang publik. Bahkan data survei menunjukkan desakan agar program MBG ini dihentikan alias tidak dilanjutkan **(44.6%)** kini semakin kencang daripada dukungan untuk tetap melanjutkan MBG **(42.1%)**.

b. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejatinya memuat niat luhur pemerintah dalam merevitalisasi urat nadi ekonomi pedesaan berbasis kekuatan kolektif atau gotong royong. Hanya saja, niat baik tersebut kembali tercederai oleh kelemahan eksekusi lapangan dari KDMP. Banyak deretan fenomena janggal yang terjadi. Mulai dari pembangunan fisik KDMP yang terkesan dipaksakan, dibangun di lokasi-lokasi yang sama sekali tidak strategis dan tidak logis, misalnya menghadap kuburan, di hutan, dan seterusnya, hingga pelatihan calon manajer KDMP yang bernuansa militeristik. Alih-alih melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat pedesaan, publik yang menjawab tahu KDMP **(76.9%)** justru semakin tidak yakin, bahwa KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan **(55.6%)**.

3. Rendahnya Kinerja Menteri dan Lemahnya Komunikasi Pemerintah

a. Rendahnya Kinerja Para Menteri

Gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kesejahteraan publik secara menyeluruh, kerap menghadapi tembok tebal berupa kegagalan eksekusi di tingkat kementerian atau kelembagaan. MBG dan KDMP bisa menjadi contoh konkret. Belum lagi korupsi yang melibatkan pembantu presiden, akan semakin menurunkan citra pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri, berkontribusi terhadap menurunnya approval rating dari pemerintah saat ini. Survei ini memotret, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran sangat rendah (**47.0%**), bahkan angkanya dibawah 50%. Sehingga publik (**51.9%**) mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama untuk bidang ekonomi dan hukum.

b. Problem Persepsi Komunikasi Pemerintah

Di era media sosial yang sarat disinformasi, fitnah, dan kebencian, strategi komunikasi publik pemerintah memegang peranan yang sangat vital. Sebagus apa pun program Presiden Prabowo, akan berisiko terdistorsi jika pemerintah gagal dalam menyampaikan informasi atau bahkan justru memicu sentimen negatif di masyarakat. Penilaian publik terhadap komunikasi pemerintah cenderung rendah, hanya **(51.2%)** publik yang menyatakan baik dan **(40.2%)** tidak baik. Belakangan, jajaran menteri atau pejabat pemerintah, terkesan pasif dan menghindar dari isu atau polemik kebijakan yang ramai dibicarakan publik. Para menteri sebagai pembantu presiden, semestinya hadir paling depan dalam menjernihkan setiap polemik kebijakan pemerintah. Supaya beban komunikasi pemerintah tidak terkonsentrasi hanya kepada Presiden Prabowo. Karena ketidakmampuan para menteri dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah berpotensi menciptakan ruang kosong yang dengan mudah diisi oleh narasi liar dari para penentangannya.

4. Menurunnya Persepsi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

a. Menurunnya Persepsi Penegakan Hukum

Rendahnya penilaian publik (**46.5%** tidak baik) terhadap penegakan hukum menandai bahwa persoalan penegakan hukum masih menjadi PR yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Masalahnya, hal ini terjadi seiring maraknya jajaran pejabat pemerintahan terjerat kasus hukum. Bahkan oknum-oknum penegak hukum, yang harus menegakkan hukum malah justru terjerat kasus hukum. Situasi ini kian mengkhawatirkan, saat publik disuguhkan “benturan” kepentingan dan “persaingan” yang tidak sehat antarlembaga penegak hukum. Alih-alih bahu-membahu menuntaskan kejahatan sistemik, rivalitas antar-institusi justru mempertegas bahwa penegakan hukum sering kali disetir oleh kepentingan politik dan perebutan pengaruh kekuasaan.

b. Menurunnya Persepsi Pemberantasan Korupsi

Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi (**45.5%** tidak baik) menurunkan persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi terdapat jajaran pembantu presiden yang terjerat skandal korupsi. Akhirnya, pidato dan retorika berapi-api yang kerap disampaikan Presiden Prabowo tentang perang melawan korupsi seolah kehilangan taringnya. Karena praktik koruptif justru tumbuh di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Publik tidak lagi mengukur komitmen pemberantasan korupsi dari kerasnya “kutukan” korupsi di atas panggung. Namun, dari tindakan nyata presiden dan para pembantunya.

5. Melemahnya Checks and Balances dan Persepsi Disharmoni Presiden-Wapres

Dalam persepsi publik, idealnya relasi eksekutif (Presiden) - Legislatif (DPR) berjalan efektif-kritis, serta relasi presiden dan wakil presiden berjalan harmonis. Tapi yang terjadi sekarang justru kebalikannya. Fungsi kontrol serta checks and balances legislatif dengan eksekutif tak berjalan dengan baik. Justru sebaliknya, persepsi publik tentang presiden dan wakil presiden dinilai mengalami disharmoni.

a. Kekosongan Oposisi Kritis

Strategi politik Presiden Prabowo, dengan merangkul hampir seluruh kekuatan partai memang berhasil menciptakan stabilitas pemerintahan yang tampak solid. Namun, konsensus besar ini harus kita bayar mahal, karena menghilangkan keberadaan oposisi kritis di ruang parlemen, sehingga muncul kelompok ekstra parlementer. Tanpa checks and balances dalam demokrasi, setiap celah kebijakan dalam program pemerintah luput dari koreksi yang konstruktif dan terarah. Akibatnya, alih-alih mendapatkan masukan yang solutif, setiap celah atau kesalahan kebijakan dan eksekusi program langsung memicu vonis penghakiman secara masif dari publik.

Misalnya, MBG (**44.6%** tidak perlu dilanjutkan) dan KDMP (**55.6%** tidak yakin mampu menghadirkan kesejahteraan). Sehingga menempatkan pemerintah dalam posisi yang rentan terhadap amukan sentimen masyarakat.

b. Persepsi Disharmoni Presiden & Wakil Presiden

Sinyal-sinyal disharmoni dan gestur canggung, yang tertangkap di ruang publik antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kian memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Keretakan komunikasi verbal maupun non-verbal di pucuk pimpinan ini tidak hanya mengaburkan kerangka kerja pemerintahan, tetapi juga meretakkan fondasi stabilitas politik yang sejak awal dibangun. Situasi kian pelik ketika dinamika tersebut mempertegas jarak politik yang makin melebar antara Prabowo dan Jokowi, sebagai figur yang hingga kini masih memiliki magnet politik. Akibatnya, ketidakselarasan antara dua figur tersebut, secara tidak langsung memengaruhi penilaian publik terhadap harmoni pemerintahan—terutama hubungan presiden dengan wakil presiden. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa persepsi publik tentang tingkat kepuasan stabilitas politik nyaris menyentuh angka di bawah 50%, tepatnya (**51.9%**).

5 FORMULA AGENDA PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAH

1. Menjaga Daya Beli dan Memperluas Lapangan Kerja

Keluhan publik tentang harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dan makin minimnya lapangan kerja, perlu secara serius direspon dengan kebijakan strategis. Faktor ini cukup determinan dalam memengaruhi persepsi kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, pemerintah perlu memperbanyak program jaring pengaman sosial, yang secara khusus menyasar kelompok rentan dengan kondisi ekonomi sangat membutuhkan. Kebijakan jaring pengaman sosial dapat secara langsung menyentuh dapur rumah tangga. Kelompok rentan akan sangat terbantu dengan kebijakan ini. Misalnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ini secara masif menjadi langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Artinya, BLT hanya bantalan sosial sementara, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu memperluas lapangan kerja dan mencegah PHK karena inilah sumbu utama penggerak perekonomian masyarakat. Pemerintah perlu menahan segala bentuk kenaikan biaya, apakah itu kenaikan pajak, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif tol, dan segala bentuk kenaikan, yang berdampak langsung pada daya beli dan tekanan ekonomi keluarga.

2. Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap Program Prioritas

Penilaian negatif publik terhadap dua program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menuntut evaluasi menyeluruh yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kritik dan masukan yang sejauh ini disampaikan publik perlu secara bijak dijadikan kompas utama dalam memperbaiki kinerja program prioritas tersebut. MBG, misalnya, sebagai program populis yang mengantarkan Prabowo terpilih sebagai presiden, perlu diaudit secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Berdasarkan berbagai catatan, MBG perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Artinya, MBG perlu difokuskan pada wilayah 3T yang paling membutuhkan intervensi gizi. Selain itu, opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG sejauh ini. Penyederhanaan MBG dalam bentuk BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dalam implementasi, dengan pengawasan terhadap realisasi pemenuhan gizi siswa atau anak-anak Indonesia.

Sementara itu, untuk menyukseskan KDMP, diperlukan audit peran dan pemetaan fungsi sosial-ekonomi di tingkat desa yang harus dirampungkan secara terperinci sebelum memasuki tahap implementasi secara masif. Melalui pembenahan tata kelola yang transparan dan adaptif serta pemetaan yang komprehensif, KDMP semestinya dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa.

3. Melakukan Perombakan Kabinet dan Memperkuat Komunikasi Pemerintah

Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri pembantu presiden, yang juga berimplikasi pada penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah (presiden dan wakil presiden) memerlukan langkah politik yang radikal dari Presiden Prabowo, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan kabinet. Khususnya di bidang ekonomi dan hukum, yang mendapatkan tingkat kepuasan paling rendah dari publik. Dalam memilih pejabat pengganti, presiden harus menempatkan kapasitas teknokratik dan rekam jejak profesionalitas. Termasuk di dalamnya, penerimaan publik sebagai kriteria utama di atas kompromi politik. Kehadiran figur-figur baru yang kompeten, akan memberikan penyegaran nyata dan sinyal kuat atas komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan. Selain itu, tentu pembenahan strategi komunikasi di tingkat menteri menjadi kebutuhan mendesak. Secara khusus, dalam mengatasi lemahnya penyampaian informasi publik yang cenderung defensif ketimbang menghadirkan solusi. Presiden Prabowo memerlukan sosok Menteri Koordinator yang tegas dan responsif. Sosok pembantu presiden yang mampu bertindak sebagai penahan benturan (bumper) isu-isu krusial. Misalnya, sebagaimana peran strategis Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Jokowi.

Kehadiran Menko yang mumpuni akan mengamankan kewibawaan institusi kepresidenan. Sehingga, tidak semua persoalan komunikasi pemerintahan menjadi tanggung jawab presiden secara langsung.

4. Memperkuat Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Rendahnya tingkat kepuasan publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, memerlukan langkah strategis nyata, dari Presiden Prabowo yang mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat sebagai pemimpin nasional. Presiden tidak boleh menoleransi benturan oknum-oknum penegak hukum ataupun benturan antar-institusi, yang sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam tubuh institusi penegak hukum. Oknum-oknum atau pimpinan yang bermasalah perlu mendapatkan sanksi berat, bahkan penggantian perlu secara tegas jika diperlukan, dengan menunjuk figur-figur baru, berintegritas tinggi dan memiliki rekam jejak bersih untuk memimpin jajaran penegak hukum. Kebijakan ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. PR pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan tindakan nyata, dari presiden sebagai kepala negara. Pembenahan terhadap institusi dan para pejabatnya merupakan pekerjaan pertama yang harus segera dibenahi, lalu diikuti totalitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5. Memperkuat Checks and Balances dan Persepsi Harmonisasi Presiden-Wapres

Tersumbatnya kanal penyaluran aspirasi di lembaga legislatif menjadi pemicu utama menguatnya gerakan politik ekstra parlemen yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Guna mengurai sumbatan tersebut, Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kebijakan strategis dengan membiarkan partai-partai yang tidak memberikan dukungan penuh tetap berada di luar pemerintahan. Keberadaan PDIP (110 kursi), NasDem (69 kursi), dan PKS (53 kursi) sebagai kekuatan penyeimbang akan menghidupkan kembali fungsi Checks and Balances yang sehat dan demokratis. Kehadiran oposisi parlemen yang memiliki total 232 kursi tersebut justru menjadi wadah formal yang elegan untuk menyerap serta menyalurkan suara kritis masyarakat. Postur koalisi pendukung pemerintah dengan kepemilikan 348 kursi sudah cukup ideal dalam mengamankan kebijakan pemerintah. Skema penataan peta politik yang berimbang ini tidak hanya memperkuat mekanisme checks and balances, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan serta kepuasan publik terhadap demokrasi Indonesia. Selain itu, harmonisasi kepemimpinan antara presiden dan wapres, menjadi kunci utama dalam membangun stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.

Presiden dan Wakil Presiden perlu secara konsisten menampilkan gestur kekompakan serta soliditas dalam setiap agenda publik. Guna menghindari kesan wapres sekadar sebagai "ban serep" tanpa peran strategis, Presiden perlu mempertimbangkan porsi otoritas serta pembagian tugas yang jelas dan terukur. Hubungan yang harmonis dan sinergis antara presiden dan wapres akan memperkuat posisi politiknya di hadapan publik.



TERIMA KASIH